



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.13, No.2, Desember 2016

# OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otonomi dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

## RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

## REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



**Mitra Bestari**

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)  
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)  
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Pemimpin Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

**Redaksi Pelaksana**

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)  
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP  
Devi Darmawan, S.H  
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id

**ISSN**

1829-8001

**DAFTAR ISI**

<b>Daftar Isi</b>		i–ii
<b>Catatan Redaksi</b>		iii–iv
<b>Artikel</b>		
	• <b>Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia</b> <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
	• <b>Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah</b> <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
	• <b>Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan</b> <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
	• <b>Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa</b> <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
	• <b>Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah</b> <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
<b>Resume Penelitian</b>		
	• <b>Masa Depan Partai Islam di Indonesia</b> <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
	• <b>Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia</b> <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
<b>Review Buku</b>		
	• <b>Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah</b> <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
<b>Tentang Penulis</b>		269–270
<b>Pedoman Penulisan</b>		271–275

## CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodada dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otodada untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

## **Redaksi**

---

**DDC: 303:324.998**

**Kadek Dwita Apriani dan Irhamna**

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL  
PENGANGGARAN PARTISIPATIF  
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI  
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148**

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rebug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rebug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

**Kata kunci:** dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

---

**DDC: 303:324.998**

**Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady**

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI  
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA  
DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166**

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

**Kata Kunci:** sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

---

**DDC: 351.17**

**Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu**

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI  
PREDATOR DI WAKATOBI:  
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU  
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191**

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

---

**DDC: 352.4**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS  
DANA DESA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211**

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** otonomi desa, efektivitas, dana desa

---

**DDC: 352.14**

**R. Siti Zuhro**

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:  
MASALAH DAN TANTANGAN  
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225**

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

---

**DDC: 324.23**

**Moch. Nurhasim**

### **MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244**

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politis di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

**Kata Kunci :** Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

---

**DDC: 320.962.4**

**Nostalgawan Wahyudhi**

### **PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260**

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

**Kata kunci:** Politik Islam, Arab spring, Demokrasi



---

**DDC: 307.72**

**Yusuf Maulana**

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA  
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268**

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

**Kata Kunci** : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

---

**DDC: 352.14**

**Kadek Dwita Apriani dan Irhamna**

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS  
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL  
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE  
STUDIES IN THREE PROVINCES IN  
INDONESIA***

*Journal of Political Research*

*Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148*

*Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater*

*the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.*

*Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses*

---

**DDC: 303:324.998**

**Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady**

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF  
INDONESIAN WOMEN PATH  
TO LOCAL POLITICS***

*Journal of Political Research*

*Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166*

*This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.*

**Keywords:** socio-economic condition, university, internet, female local leader.

---

**DDC: 351.17**

**Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu**

**DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191**

*The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major government tourist projects. This group of politicians and enterprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.*

**Keywords:** Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

---

**DDC: 352.4**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

**VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211**

*The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.*

**Keywords:** village autonomy, effectiveness, village fund

---

**DDC: 352.14**

**R. Siti Zuhro**

**LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225**

*After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation*

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

**Keywords:** decentralization, local autonomy, local government, public services.

---

**DDC: 324.23**

**Moch. Nurhasim**

### **THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244**

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

**Keywords:** Party, Islamic Party, Democracy, Election

---

**DDC: 320.962.4**

**Nostalgawan Wahyudhi**

### **THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260**

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

**Keywords:** Political Islam, Arab Spring, Democracy

---

**DDC: 307.72**

**Yusuf Maulana**

### **INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268**

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

**Keywords:** village, decentralization, autonomy, institutional.

# **DESENTRALISASI DAN OLIGARKI PREDATOR DI WAKATOBI: PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

## ***DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT***

**Eka Suaib**

Universitas Halu Oleo  
Email: ekasuaib1966@gmail.com

**La Husen Zuada**

Universitas Halu Oleo  
Email: husenzuadaui@gmail.com

**Waode Syifatu**

Universitas Halu Oleo

Diterima: 7 September 2016; direvisi: 28 Oktober 2016; disetujui: 29 Desember 2016

### ***Abstract***

*The present article discusses about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major gorvernment tourist projects. This group of politicians and enternprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.*

**Keywords:** *Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakato*

### **Abstrak**

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

## Pendahuluan

Transisi kekuasaan dari otoriter Soeharto menuju demokrasi tidak diikuti dengan keruntuhan oligarki di Indonesia. Kelompok oligarki yang hidup dan dibesarkan oleh Soeharto masih tetap bertahan dan mereformasi diri. Fenomena bertahannya oligarki terlihat dalam laporan majalah Forbes (2010), dimana setelah dua belas tahun reformasi bergulir sebanyak 40 orang warga negara Indonesia menguasai 10,3 % PDB dengan total kekayaan 680 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan kekayaan 60 juta jiwa orang paling miskin.

Pada tahun 2015 berdasarkan catatan Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat pertama negara paling timpang di Asia. Sejumlah analisis berpendapat bahwa situasi ini lebih parah bila dibandingkan dengan kesenjangan menjelang orde baru runtuh serta enam belas tahun reformasi bergulir. Bercokohnya oligarki di tingkat nasional tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di tingkat daerah, dimana kekuasaan material (kekayaan) terkonsentrasi pada sekelompok orang. Mereka adalah kaum oligarki zaman orde baru yang masih bertahan dan para oligarki yang muncul ketika desentralisasi digulirkan.<sup>1</sup> Oligarki yang disebutkan terakhir, lahir dengan memanfaatkan sejumlah kewenangan yang diserahkan kepada daerah di era otonomi daerah.

Kehadiran otonomi daerah dan desentralisasi dipandang dapat menciptakan tiga hal<sup>2</sup>: *pertama*, menyediakan *public good and services*, efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi; *kedua*, meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat serta mempertahankan integrasi nasional; *ketiga*, mewujudkan *politic equality*, *local accountability*, *local responsiveness*. Tidak dapat dipungkiri tiga tujuan itu terwujud pada

<sup>1</sup> Ulasan tentang oligarki era orde baru dan era reformasi ini baca Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Indonesia Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2005). Baca pula Jeffrey Winters., *Oligarki*. (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 206-286. Baca juga Richard Robison, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

<sup>2</sup> Pandangan ini diutarakan oleh Rondinelli, dalam bahasa yang berbeda diutarakan pula oleh Jurgen Ruland. Keduanya lihat dalam Syarif Hidayat., *Too Much Too Soon Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 238-240.

beberapa daerah. Meskipun pada sisi yang lain, desentralisasi dimanfaatkan pula oleh sekelompok orang untuk memperkaya diri. Tak heran kemudian istilah desentralisasi kekuasaan, diikuti pula desentralisasi kekayaan kepada sekelompok orang. Istilah ini tampak relevan untuk menggambarkan perjalanan lima belas tahun otonomi daerah di Indonesia (2001-2016).

Desentralisasi yang diharapkan mewujudkan prinsip kesetaraan, keadilan dan partisipasi, pada beberapa daerah di Indonesia, justru meminggirkan masyarakat, baik dalam aspek politik maupun ekonomi. Praktek tersebut diantaranya berlangsung di Wakatobi, dimana sekelompok orang menguasai sebagian besar bisnis pariwisata yang menjadi sektor andalan kabupaten yang mekar dari Kabupaten Buton tahun 2003 silam. Penguasaan bisnis pariwisata oleh sekelompok orang semakin tidak menguntungkan bagi masyarakat Wakatobi yang memiliki kekuasaan atas tanah dan berprofesi sebagai nelayan. Mereka dibatasi dan dilarang untuk mencari mata pencaharian di sekitar pusat-pusat bisnis pariwisata (resort) yang dikelola oleh para oligarki di Wakatobi. Selain pemilik resort, pembatasan terhadap nelayan juga didukung oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah<sup>3</sup> yang memberlakukan sistem zonasi taman nasional, yang berakibat pada pelarangan penangkapan ikan pada zona-zona tertentu.<sup>4</sup> Dampak ini sangat dirasakan oleh nelayan dan orang laut (suku Bajo) yang semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Salah satu peraturan daerah yang membatasi ruang gerak nelayan di Wakatobi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.

<sup>4</sup> Kesulitan para nelayan ini ditulis pula dalam laporan riset lembaga internasional OXFAM bahwa masalah yang dihadapi oleh nelayan-nelayan lokal di Wakatobi (Sampela dan Ambeua) yaitu kebebasan mereka untuk menangkap ikan di lepas pantai telah dibatasi. Lihat Paul Simonin, *Laporan Mengenai Resiliensi (Ketangguhan) Pedesaan: Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia*, (Atkinson Center for a Sustainable Future & OXFAM), hlm. 19

<sup>5</sup> Keluh kesah kesulitan hidup yang dialami oleh Suku Bajo di Wakatobi diceritakan oleh Indrawati Aminudin (scholar *jurusan Leisure, Tourism and Environment di Wageningen University, Belanda*) dalam artikelnya yang berjudul "Orang Bajo di Surga Bawah Laut" 5 Maret 2012, <http://indoprogess.com/2012/03/orang-bajo-di-surga-bawah-laut/> (diakses pada tanggal 29 September 2016).

Keunggulan pariwisata dan desentralisasi di Wakatobi dimanfaatkan oleh elit politik dan elit ekonomi untuk melakukan akumulasi kekayaan dan mempertahankan kekayaan—pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Di era otonomi daerah (tahun 2015) sejumlah elit politik dan ekonomi di Wakatobi merupakan ‘pemain besar’ dalam sektor perkonomian. Diantara mereka terbagi dalam bisnis yang berbeda dan ada pula yang mencoba menggarap lebih dari dua sektor. Bisnis itu meliputi: bisnis transportasi (kapal), pengerjaan proyek infrastruktur (jalan, bandara dan pelabuhan), serta penyedia resort dan hotel.

Bisnis transportasi laut terbesar di Wakatobi misalnya, dimiliki oleh Arhawi (pengusaha lokal/Wakil Bupati Wakatobi 2011-2016/Bupati Wakatobi terpilih 2016-2021). Sektor infrastruktur dikerjakan oleh Ceng Ceng, pengusaha Tionghoa yang berasal dari Bau-Bau dan memiliki kedekatan dengan Hugua, Bupati Wakatobi dua periode (2006-2011/2011-2016). Hugua yang juga Ketua DPD PDI.P Sulawesi Tenggara membangun kerajaan bisnis dibawah bendera Patuno Resort dan Pata Pulo Travel, yang bergerak dibidang bisnis pariwisata dan transportasi.

Sosok lain yang cukup berpengaruh adalah Mr. Lorenz Mader, pengusaha dan warga negara Swiss pemilik *Wakatobi Dive Resort*. Berbeda dengan Hugua, Arhawi dan Ceng Ceng yang muncul di era otonomi daerah, Mr. Lorenz hadir sejak orde baru dan di era otonomi daerah tetap bertahan. Mr. Lorenz merupakan saingan Hugua dalam bisnis pariwisata (Resort) di Wakatobi. Melalui wawancara di media Hugua seringkali menyinggung sektor Pariwisata Wakatobi dikuasai oleh asing (Lorenz didalamnya) dan harus dikurangi, meskipun hal ini tidak pernah terbukti. Di Lamanggau Lorenz semakin berkuasa dan mampu mempertahankan pendapatannya. Secara bersamaan Hugua tumbuh menjadi oligarki lokal yang predator.

Sejak dipimpin Hugua, Wakatobi menjadi salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi (mendekati 10 %) di Sulawesi Tenggara. Sepuluh tahun berkuasa, Hugua mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, kunjungan wisatawan dan membuka keterisolasian Wakatobi melalui pembangunan dan pengoperasian

bandara Mataohara. Hugua juga secara perlahan menurunkan angka kemiskinan di Wakatobi, namun hal ini tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Ketimpangan masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi setiap tahun mengalami kenaikan.

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi tinggi Wakatobi tampak tidak berpengaruh secara nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran. Laporan analisis pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara<sup>6</sup> mengkategorikan Wakatobi sebagai daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth less-pro poor* dan *high-growth, less-pro job*).<sup>7</sup>

Pembangunan di era Hugua juga dinilai terlalu fokus ke laut dan mengabaikan daratan. Situasi ini tergambar pada rendahnya kualitas infrastruktur di daratan, seperti: jalan dan keterbatasan fasilitas umum (perbankan, hotel dan alat transportasi darat).<sup>8</sup> Atas kondisi itu, tidak heran kemudian para aktivis, pemerhati<sup>9</sup> dan elit politik<sup>10</sup> di Wakatobi bersuara kritis. Hugua dinilai tidak memberikan banyak manfaat bagi Wakatobi sejak memisahkan diri dari Kabupaten Buton. Dalam berbagai tulisan dan pernyataan para aktivis seringkali meminjam istilah Hugua yang menyebut Wakatobi sebagai ‘Surga Laut’. Oleh para aktivis *tagline* ini dijadikan kelakar ‘surga di laut dan neraka di darat’. Ungkapan ini merupakan ekspresi kekecewaan atas kepemimpinan Hugua yang tidak memberikan

---

<sup>6</sup> *Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015*, hlm. 4-7

<sup>7</sup> Pada tahun 2014 IPM Wakatobi mencapai 66,95. Lihat: Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2015*, (Kendari: BPS, 2015), hlm. 364

<sup>8</sup> Suasana ini dirasakan langsung oleh penulis saat berkunjung ke Wakatobi 5-11 Agustus 2015.

<sup>9</sup> Sebuah lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Komunikasi KABALI menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah Hugua yang mengesampingkan kepentingan masyarakat dan lebih berpihak pada kepentingan pemodal. Lihat <http://kabali-indonesia.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-program-kepariwisataan.html> (diakses pada 8 Agustus 2016)

<sup>10</sup> Salah satu elit politik yang cukup kritis terhadap pemerintahan Hugua adalah Daryono Moane (Mantan Ketua DPRD Wakatobi).

banyak manfaat bagi masyarakat Wakatobi, terkecuali Hugua dan kelompok elit lainnya yang semakin kaya dan berkuasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini mencoba menjawab pertanyaan, seperti apa profil dan sumber daya kekuasaan kelompok oligarki di Wakatobi? Dampak apa yang ditimbulkan dari praktek oligarki terhadap pembangunan perdesaan?

### **Oligarki, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan**

Dalam terminologi klasik, oligarki dipahami sebagai kekuasaan sekelompok kecil orang (minoritas). Istilah ini dianggap kurang tepat, karena mengartikan oligarki sebagai kekuasaan sekelompok orang sama halnya menyamakannya dengan elit, yang juga dipahami sebagai kekuasaan oleh sekelompok orang. Oligarki dan elit adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat dikatakan oligarki, jika ia memegang kendali sumber daya kekuasaan individual secara terkonsentrasi. Sumber daya kekuasaan itu meliputi: 1). hak politik; 2). kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintahan atau organisasi; 3). kekuasaan pemaksaan (koersif); 4). kekuasaan mobilisasi; 5). kekuasaan material.<sup>11</sup> Sebaliknya, jika seseorang hanya menguasai empat sumber daya kekuasaan disebutkan pertama, tanpa memiliki kekuasaan material bukanlah oligarki, tapi elit. Guna membedakan keduanya Winters menyebut sebagai berikut:

“oligark bisa punya bentuk kekuasaan elite di atas atau bercampur dengan dasar material... tapi elite tak bisa menjadi oligark kalau tidak memiliki dan menggunakan sendiri kekuasaan material yang besar...seorang bangsawan feodal dapat menjadi oligark, tapi jelas bukan kapitalis. Seorang pemilik bisnis bisa menjadi kapitalis namun mungkin kekuasaan materialnya masih kurang untuk menjadi oligark”.

Elite yang disebut Winters ini hampir senada dengan pendapat Suzanne Keller yang mempopulerkan istilah elite penentu yaitu mereka yang dipertimbangkan keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan

anggota masyarakat.<sup>12</sup> Elit penentu menurut Keller meliputi pemimpin politik, ekonomi, militer, moral, budaya dan ilmu pengetahuan. Meskipun itu menurut Keller mereka-mereka tersebut dapat dikatakan sebagai elit penentu, jika ruang lingkup kegiatannya mengenai berapa banyak anggota masyarakat yang dikenai.

Oligarki menurut Jeffrey Winters adalah politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.<sup>13</sup> Pertahanan kekayaan mengandung dua hal yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Pertahanan harta adalah upaya oligarki untuk memastikan kekayaan mereka tidak diambil oleh pihak lain yang menginginkan, sedangkan pertahanan pendapatan adalah bagaimana oligarki mempertahankan pendapatannya melalui investasi pribadi. Seorang pejabat korup dan mengumpulkan kekayaan pribadi (dengan cara apapun), maka dia menjadi elite pemerintah sekaligus oligark yang mampu melibatkan diri dalam politik pertahanan kekayaan.<sup>14</sup> Dengan demikian seseorang dapat dikatakan oligarki jika menguasai sumber daya politik dan sumber daya ekonomi, yang digunakan untuk melindungi dan melakukan akumulasi kekayaan.

Vedi Hadiz menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia memberikan jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi “oligarki lokal”. Subyek tersebut adalah bertahannya warisan Orde baru yaitu kelompok predatoris yang kuat yang mengontrol kekuasaan negara (institusinya dan sumber dayanya) dan dibarengi dengan tidak terorganisirnya gerakan sosial yang independen di masa desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi justru memperkuat posisi ekonomi dan politik “oligarki lokal” yang predator ketimbang memperkuat masyarakat lokal.<sup>15</sup>

Vedi Hadiz melihat bahwa pasca Soeharto terjadi suatu persaingan di antara berbagai

<sup>11</sup> Jeffrey Winters, *Oligarki*, hlm. 18

<sup>12</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kekompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 28

<sup>13</sup> Jeffrey Winters, *Oligarki*, hlm. 10

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>15</sup> Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 47-49.



kelompok dominan untuk memperebutkan kontrol atas aparatur dan otoritas negara, terutama dalam hubungannya dengan alokasi sumber daya dan patronase negara.<sup>16</sup> Persaingan itu berlangsung dalam sistem terbuka dan tidak terpusat. Partai politik dan parlemen menjadi wadah persaingan, disertai dengan politik uang. Sistem ini diperankan oleh aktor-aktor lokal—tokoh-tokoh daerah, birokrat-politik dan para pengusaha—yang pada era Soeharto telah mengalami kematangan. Singkatnya, logika utama kehidupan politik di Indonesia pasca-Soeharto tetap saja perebutan peluang-peluang untuk *rent-seeking* melalui pengamanan ‘akses menuju posisi aparatur negara’ untuk tujuan-tujuan akumulasi pribadi.

Lebih lanjut Hadiz menyebut, desentralisasi menyebabkan politik di tingkat lokal menguat kembali tetapi tidak disertai dengan konsolidasi demokrasi berideologi liberal karena menghasilkan “oligarki lokal” yang predatoris dengan penggunaan politik uang dan premanisme. Pembajakan institusi demokrasi yang berlangsung selama desentralisasi dilakukan oleh koalisi yang memiliki kepentingan-kepentingan predatoris (perampok/penghisap). Indikasinya dapat dilihat dari aktor politik yang terlibat seperti birokrat dan pengusaha yang masih membutuhkan dan bergantung pada proyek negara dan kontrak-kontrak pemerintah, politisi-politisi yang asal usulnya masih bisa dihubungkan dengan partai-partai lama Orde Baru dan rekrutmen aparatur politik dan operator politik masih berasal dari organisasi-organisasi seperti KNPI, HMI dan GMNI.<sup>17</sup>

Dalam penelitian Vedi R. Hadiz di Sumatera Utara, para elit menganggap lembaga-lembaga demokrasi yang digerakkan dengan politik uang dan kekerasan bisa sama menguntungkannya dengan perlindungan rezim otoritarian yang bersifat menyeluruh. Bahkan deretan kepentingan yang sekarang memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tampak lebih bervariasi dibandingkan

<sup>16</sup> Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 169

<sup>17</sup> Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations : The Indonesian Paradox”, *Journal of Development Studies* Volume 41 Nomor 2 Bulan Februari 2005

pada masa Soeharto. Di dalamnya termasuk para pialang dan bandar politik ambisius, birokrat negara yang lihai dan masih bersifat predatoris, kelompok-kelompok bisnis baru yang berambisi tinggi serta beranekaragam gangster politik, kaum kriminal dan barisan keamanan sipil. Mayoritas dari kelompok-kelompok ini dibesarkan oleh rezim Orde Baru sebagai operator dan pelaksana lapangannya.<sup>18</sup>

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim otoritarian Orde Baru secara mengesankan berhasil melakukan metamorfosis menjadi oligarki dengan penggunaan politik uang. Oligarki baru yang hidup di masa pasca otoritarian berhasil memanfaatkan jaringan patronase dan mekanisme untuk mengalokasi kekuasaan dan kekayaan publik, mereka mendapatkan arena baru dalam wujud partai politik dan parlemen. Di dalam akomodasi sistem kekuasaan politik yang telah mengalami desentralisasi dan difusi berhasil mampu mengubah mereka yang pada awalnya seorang reformis menjadi bagian di dalam persatuan kapitalisme predatoris dan politik demokratis yang dibangun oleh kekuatan Oligarki.<sup>19</sup>

Desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predatoris lokal. Fakta memperlihatkan oligarki lama dan kepentingan predatoris tidak mampu dihilangkan oleh reformasi. Mereka berhasil menyesuaikan diri dan memperlihatkan bahwa mereka juga bagian dari demokrasi dan reformasi. Ada lima bentuk elit lokal yang bertarung dalam arena politik lokal di Indonesia era desentralisasi. *Pertama*, mantan elit yang dibesarkan oleh Orde Baru yang telah belajar untuk menguasai politik demokrasi pada tingkat lokal melalui penggunaan politik uang dan berbagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. *Kedua*, birokrat tua yang dibesarkan oleh Orde Baru yang berharap mampu melakukan transformasi birokrasi yang telah lama mereka pegang menjadi kekuatan politik yang mampu secara langsung menentukan melalui pembangunan koalisi lokal sebagai kekuatan pendukungnya. *Ketiga*, pengusaha lokal dengan kategori pengusaha dibidang usaha

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London: Routledge, 2004), hlm. 187-188.

kecil atau menengah seperti misalnya kontraktor, perdagangan dan jasa yang ambisi semakin meningkat. *Keempat*, kelompok preman dan kelompok kekerasan yang selama Orde Baru menjadi alat ditingkat lokal yang hendak mencoba mencari peruntungan dalam politik demokrasi. *Kelima*, kelompok politik yang biasanya menjadi operator dimasa Orde Baru terutama organisasi massa mahasiswa dan pemuda yang dibina Orde Baru seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Komite Nasional Pemuda Indonesia.<sup>20</sup>

“Oligarki lokal” yang predator melakukan berbagai macam cara terutama politik uang dan premanisme politik dalam rangka mempertahankan dan mengamankan posisi mereka. Politik uang dilakukan karena tidak transparannya penghimpunan dana politik terutama di tingkat lokal. Pemilihan umum (eksekutif dan legislatif) di tingkat lokal telah berubah menjadi industri yang berbiaya tinggi. Premanisme politik dilakukan oleh satgas partai dan ormas yang menjadi milisi represif bagi kekuasaan Orde Baru (FKPPI dan Pemuda Pancasila) serta organisasi kekerasan berbasis agama dan kedaerahan (FPI dan FBR),<sup>21</sup> organisasi Jawara (PPPSBBI Banten),<sup>22</sup> Blater di Madura<sup>23</sup> dan mantan kombatan di Aceh.

Vedi Hadiz mencatat bahwa kekuatan-kekuatan gerakan sosial memiliki akses yang kecil terhadap kekuasaan dan sumberdaya serta tidak dipersiapkan dengan baik berani menantang dan bertarung dengan elit lokal yang predatoris yang memiliki posisi sosial dominan. Pertarungan yang berakhir dengan kekalahan dipihak kekuatan-kekuatan gerakan sosial dikarenakan demokratisasi dan desentralisasi tidak berdampak

positif bagi peningkatan kapasitas organisasi petani dan organisasi buruh sebagai kekuatan sosial utama gerakan sosial. Tanpa organisasi yang kuat dan vokal, buruh terisolasi dalam sistem pemilihan yang didominasi pembelian suara, biaya tinggi dan persekutuan pengusaha kota besar dan organisasi kekerasan. Tidak ada keberpihakan pemerintah ketika gerakan petani dan masyarakat adat menghadapi konflik tanah dengan perusahaan besar. Justru aparat keamanan kembali melakukan represi seperti jaman otoriter.<sup>24</sup>

Melvin P. Hutabarat menyebut ada 8 ciri oligarki predator yang dimaksud oleh Vedi Hadiz.<sup>25</sup> *Pertama*, kelompok predator mengontrol masyarakat melalui politik uang dan kekerasan. *Kedua*, latar belakang ekonomi kelompok predator tidak selalu kaya. *Ketiga*, proses pembentukan kelompok predatoris melalui: 1). Bertahannya warisan politik otoriter yaitu kelompok predatoris yang kuat mengontrol kekuasaan negara (institusinya dan sumber dayanya); 2. Tidak terorganisirnya gerakan sosial yang independen. *Keempat*, aktor kelompok predatoris terdiri dari mantan elit orde baru, birokrat tua orde baru, pengusaha lokal, kelompok preman dan kelompok ormas mahasiswa/pemuda. *Kelima*, kekuasaan di tingkat lokal terpusat kepada klik politik antara pengusaha, birokrat dan politisi. *Keenam*, hubungan dengan pemerintah pusat bersekutu, karena mereka adalah bagian dari oligarki lama Orde Baru yang mampu bertahan. *Ketujuh*, afiliasi partai politik, bisa bergabung dengan partai lama seperti Golkar, PDI Perjuangan dan PPP ataupun partai-partai baru seperti PAN, PKB, PKS dan partai lainnya. *Kedelapan*, reproduksi kekuasaan adalah bagian dari klik politik melalui mekanisme pemilihan umum.

Kehadiran oligarki dan elit ekonomi mendorong gairah usaha baru yang berdampak pada pembangunan perdesaan. Konsep pembangunan perdesaan berasal dari kata

<sup>20</sup> Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 92-94

<sup>21</sup> *ibid*, hlm. 133-141

<sup>22</sup> Lihat: Lili Romli, *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)*, (Jakarta: Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2007).

<sup>23</sup> Baca Abrur Rozaki, “Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura”. *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11* (December 2009).

<sup>24</sup> Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 143-160

<sup>25</sup> Lihat Melvin P. Hutabarat, *Fenomena “Orang Kuat” Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi*. (Depok: Tesis, Universitas Indonesia, 2012), hlm. 29-30

desa. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara perdesaan menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa desa dan perdesaan memang mempunyai perbedaan, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan hal ini membentuk desa (*rural village*), sekaligus sangat terkait dengan agenda pembangunan lokal. Bappenas membedakan pengertian pembangunan desa dan pembangunan perdesaan. Pembangunan desa identik dengan “desa membangun”, sedangkan pembangunan perdesaan identik dengan “membangun desa”.

**Tabel. 1.** Pembangunan Perdesaan Vs. Pembangunan Desa

Items/Isu	Membangun Desa (Pembangunan Perdesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
<b>Pintu masuk</b>	Perdesaan	Desa
<b>Pendekatan</b>	Functional	Locus
<b>Level</b>	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
<b>Isu dan konsep-konsep terkait</b>	<i>Rural-urban linkage</i> , market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan,	Otonomi, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, dll.
<b>Level, skala dan cakupan</b>	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa. Contohnya adalah kecamatan sebagai <i>small town</i> .	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
<b>Skema kelembagaan</b>	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	UU menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan perdesaan, alokasi dana dan kontrol lokal.

<b>Pemegang kewenangan</b>	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
<b>Tujuan</b>	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta membangun desa yang mandiri
<b>Peran pemerintah daerah</b>	Merencanakan, membiayai dan Melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
<b>Peran desa</b>	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur lintasdesa yang lebih baik</li> <li>• Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota.</li> <li>• Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i>, industri, wisata, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan</li> <li>• pelayanan public bagi warga</li> <li>• Satu desa mempunyai produk</li> <li>• ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>).</li> </ul>

Sumber: Hasil Kajian Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas, 2010.

Desa membangun adalah campur tangan pemerintah level di atasnya (kabupaten, provinsi, pusat) dilakukan secara tidak langsung kepada masyarakat desanya, sedangkan “membangun desa” dilakukan oleh sektor-sektor terkait dari level pemerintah di atasnya.<sup>26</sup> Pembangunan perdesaan sendiri secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan yang bertumpu pada kepentingan, karakter, potensi serta kemandirian.

### Struktur Sosial Ekonomi Wakatobi

Wakatobi merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk sejak tahun 2003 pemekaran dari Kabupaten Buton berdasarkan UU No. 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Wakatobi merupakan akronim

<sup>26</sup> BAPPENAS, *Laporan Akhir Evaluasi Pembangunan Perdesaan Dalam Konteks Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. (Jakarta: BAPPENAS, 2011), hlm. 16

dari empat pulau yang berjejer disebelah tenggara pulau Buton yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Dahulu jejeran pulau-pulau kecil yang berada dibawah pulau Buton dinamai kepulauan tukang besi. Istilah tersebut melekat dengan profesi masyarakat Wakatobi khususnya Binongko sebagai pengrajin besi, seperti: membuat parang yang ditempa dari besi. Atas hal ini, Hoger seorang berkebangsaan Belanda menyebut wilayah Wakatobi sebagai kepulauan Toekang Besi Eilanden.

Lain pula cerita tradisi lisan masyarakat Wakatobi, tukang besi merupakan nama Raja Hitu, Tuluka Besi. Raja Tuluka Besi dikenal memiliki pengikut setia dan seringkali merepotkan pemerintahan kolonial Belanda. Oleh Belanda, Raja Tuluka Besi bersama pengikutnya direncanakan untuk diasingkan ke Batavia, namun hal ini batal terlaksana setelah melakukan perlawanan dan selanjutnya melarikan diri di Pulau Wangi-Wangi. Tuluka Besi dan para pengikutnya ini oleh masyarakat Wakatobi diyakini sebagai cikal bakal penduduk Wakatobi.<sup>27</sup> Penuturan seorang antropolog Universitas Halu Oleo, Dr. Waode Syifatu menyebut bahwa pengikut Tuluka Besi bukanlah penduduk asli Maluku. Mereka adalah orang-orang Buton yang merantau di Maluku. Dengan demikian kedatangan mereka di Wangi-Wangi bukanlah pelarian tapi kembalinya mereka ke tanah leluhur.<sup>28</sup>

Wakatobi yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kesultanan Buton mengenal startifikasi sosial dalam masyarakat, yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: golongan Kaomu, Walaka dan Papara.<sup>29</sup> Di era kesultanan, kekuasaan di Wakatobi dipegang oleh golongan kaomu (bangsawan/raja). Di era pemerintahan modern dan demokrasi liberal pemimpin lahir atau diseleksi melalui mekanisme pemilihan dan

keahlian di bidang tertentu khususnya pendidikan. Hal ini berakibat pada terkikisnya secara perlahan dominasi bangsawan yang dalam tulisan ini saya sebut elite lama (*old elite*). Sebaliknya mereka yang punya perahu, perantau, birokrat dan aktivis menjadi elite baru (*new elite*). Mereka yang punya perahu dan perantau oleh masyarakat Wakatobi diidentifikasi sebagai orang yang berada/berharta (memiliki kekayaan). Menurut Waode Syifatu, orang yang punya perahu dan perantau di Wakatobi memiliki kemampuan untuk mengganti camat dan jajaran pemerintahan lainnya.<sup>30</sup> Lain pula birokrat dan aktivis yang menjadi penguasa karena memiliki pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Di era reformasi, sumber kekuasaan di Wakatobi semakin beragam, jika sebelumnya penguasa berasal dari kaum bangsawan, kini bergeser pada kalangan terdidik dan mereka yang memiliki kekayaan (harta). Munculnya kaum terdidik tampak pada terpilihnya dan terangkatnya mereka sebagai pejabat pemerintahan di Wakatobi, seperti Bupati, anggota DPRD dan birokrat. Saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton, pejabat di Wakatobi berasal dari kaum birokrat (camat). Pasca menjadi daerah otonom, kepala daerah diseleksi melalui mekanisme pemilihan, mereka yang terpilihlah menjadi penguasa di Wakatobi. Terpilihnya Hugua sebagai Bupati Wakatobi Tahun 2005 menjadi awal kebangkitan kaum aktivis. Hugua oleh masyarakat Wakatobi dikenal sebagai aktivis dan pegiat LSM. Profesi Hugua sebagai pegiat LSM mampu mendatangkan bantuan (air bersih) bagi daerahnya. Hal ini menjadikan ia semakin dikenal dan menjadi modal sosial bagi dirinya ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Wakatobi.<sup>31</sup> Selain Hugua ada pula Muhamad Ali Tembo yang juga berlatar belakang aktivis yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Wakatobi.

Lebih lanjut, masuknya orang kaya sebagai pejabat di Wakatobi diawali dengan terpilihnya Arhawi sebagai anggota DPRD Wakatobi tahun 2009. Dua tahun berselang (2011), Arhawi terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi

<sup>27</sup> Pemerintah Daerah Wakatobi, "Laporan Akhir Rencana Pengelolaan Pariwisata Wakatobi", Pemda Wakatobi, hlm. 9.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Waode Syifatu, 21 Oktober 2016, pukul 17.00 WITA.

<sup>29</sup> Kaomu adalah golongan masyarakat yang berhak menduduki jabatan sultan. Walaka adalah golongan masyarakat kesultanan Buthuuni yang berhak menduduki jabatan legislatif. Papara yaitu mereka yang tidak mempunyai garis silsilah keturunan dari kedua golongan tersebut (Kaomu dan Walaka) disebut sebagai golongan masyarakat biasa.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Waode Syifatu, 21 Oktober 2016, pukul 17.00 WITA.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rasman, Dosen Universitas Muhammadiyah Buton, 19 September 2016, pukul 20.00 WITA.

Hugua pada periode kedua pemerintahannya. Seperti keterangan salah satu narasumber, pemilihan Arhawi oleh Hugua lebih pada pertimbangan materi yang dimiliki. Latar belakang Arhawi sebagai pengusaha dipandang dapat memudahkan langkahnya terpilih kembali ditengah biaya politik yang semakin mahal.<sup>32</sup> Pada Pemilu 2014, orang yang memiliki kekayaan dan perahu semakin banyak yang mencalonkan diri sebagai caleg, diantara mereka ada yang terpilih dan ada pula yang tidak terpilih. Pilkada 2015, kekuatan uang dalam memperebutkan jabatan kepala daerah semakin nyata terlihat. Di Wakatobi calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjumlah dua pasangan calon (*head to head*) memiliki kekayaan tertinggi dibanding enam daerah lain yang melangsungkan Pilkada.<sup>33</sup>

Menurut Waode Syifatu, status sosial sebagai bangsawan, orang yang memiliki perahu (kaya) dan memiliki pendidikan, menjadi daya dukung seseorang untuk terpilih atau menjadi penguasa di Wakatobi. Penuturan ini diakui pula oleh Mahmud, seorang akademisi asal Wakatobi.

“Di Wakatobi untuk bisa terpilih sebagai pejabat politik harus didukung oleh kekuatan finansial (seperti: memiliki perahu, perantau, tanah). Mereka yang memiliki perahu/ kapal mempekerjakan banyak orang dan memiliki uang, sehingga sangat mudah untuk mengajak dan memobilisasi pemilih agar memberikan dukungan. Jika para pekerja tidak menuruti perintah sang pemilik kapal mereka akan dipecat/ tidak dipekerjakan lagi. Pengaruh mereka yang memiliki uang ini sangat kuat terasa ketika dalam pemilihan kepala desa, caleg hingga kepala daerah. Salah satu contohnya legislator PAN terpilih, Ariati. Legislator asal Tomia ini bukan bangsawan dan bukan pula yang memiliki pendidikan baik, tapi karena kekuatan uang dan bapaknya (Baharudin Isa/mantan

<sup>32</sup> Wawancara dengan S, aktivis Wakatobi, 22 Oktober 2016, pukul 13.00 WITA.

<sup>33</sup> Pilkada Wakatobi 2015 diikuti dua pasangan Calon yaitu Pasangan Arhawi dan Ilmiati Daud yang diusung oleh PAN dan koalisinya. Sementara pasangan Haliana dan Muhamad Syawal didukung oleh PDI.P. Dalam rilis harta kekayaan oleh KPU, Arhawi merupakan calon kepala daerah terkaya di Wakatobi dan Sultra dengan jumlah kekayaan 44 miliar rupiah. Sementara Haliana merupakan calon kepala daerah terkaya kedua di Wakatobi dan Sultra dengan jumlah harta berkisar 31 miliar rupiah.

camat dan penguasa tanah pulau One Mobaa/ pulau Lorenz), pada Pemilu 2014 ia terpilih sebagai anggota DPRD. Selain itu, mereka yang berpendidikan juga banyak terpilih/duduk sebagai pejabat politik di Wakatobi, contohnya: Hugua dan Muh. Ali Tembo (Ketua DPRD Wakatobi). Mereka berdua bukan bangsawan, bukan pula orang kaya, tapi mereka dikenal sebagai aktivis LSM yang memiliki pengetahuan dan pendidikan.”<sup>34</sup>

Menurut Mahmud, modal finansial dan pendidikan merupakan sumber kekuasaan di Wakatobi. Sebaliknya status sosial sebagai bangsawan semakin tidak mendapat tempat/ dukungan untuk bisa terpilih. Menurut Mahmud, kepemilikan finansial, pendidikan, peran mosega (orang kuat, pandai silat, kebal dari benda tajam, kebal dari guna-guna) sangat mempengaruhi terpilihnya pejabat publik di Wakatobi.<sup>35</sup>

Dalam pemilihan, mosega memiliki kekuasaan informal untuk mempengaruhi pemilih secara persuasif dan represif. Mosega seringkali digunakan oleh para elite politik sebagai alat pemaksa dan pelindung mereka, selain polisi dan aparat pemerintah.

“Dalam ajang pemilihan, pejabat atau calon pejabat mendapat pengawalan dari polisi, satgas partai dan preman. Satgas partai banyak diisi oleh orang-orang sega (berani) yang dikenal memiliki kekebalan dan pandai berkelahi.”<sup>36</sup>

Mosega dalam perpolitikan lokal Indonesia memiliki kemiripan dengan Jawara (Banten), Blater (Madura), mantan kombatan (Aceh). Yang membedakan, Mosega di Wakatobi belum menduduki kekuasaan atau terpilih sebagai kepala daerah. Sementara Jawara, Blater dan

<sup>34</sup> Wawancara dengan Mahmud, akademisi UHO asal Wakatobi.

<sup>35</sup> Di zaman dahulu (kerajaan) mosega dikenal sebagai pasukan yang pandai silat (balaba) dan memiliki kesaktian (tidak ditembus parang dari serangan senjata) yang bertugas mempertahankan wilayah kekuasaan. Mosega menunjuk pada pemimpin suatu kelompok biasanya diambil dari orang-orang yang gagah berani, cekatan, ahli berkelahi dan ahli perang. <http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-singkat-wakatobi.html>

<sup>36</sup> Wawancara dengan SD, mahasiswa asal Wakatobi.

mantan kombatan telah berhasil menduduki posisi sebagai kepala daerah (transformasi menjadi penguasa). Sosok Mosega di Wakatobi identik dengan terminologi Migdal tentang *local strongman* (orang kuat lokal). Bangsawan, pemilik perahu atau yang memiliki tanah, aktivis, mosega dan birokrat merupakan elite penentu di Wakatobi.

Orang Wakatobi dikenal sebagai pelaut tangguh yang mampu melintasi lautan luas. Keberanian pelaut Wakatobi tidak terlepas dari kebiasaan menaklukkan ombak di wilayah tempat tinggal mereka, yang berhadapan langsung dengan laut Banda.<sup>37</sup> Sambil berlayar, orang Wakatobi juga menjalankan aktivitas perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Tidak heran kemudian orang Wakatobi memiliki peranakan dan banyak menetap (merantau) di setiap wilayah pesisir kepulauan di Indonesia, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Bugis, Makassar dan Bajo. Profesi pelaut orang Wakatobi kerap dimanfaatkan oleh para penyeludup untuk mengangkut barang-barang (elektronik, otomotif, pakaian, ikan, kayu dan hasil laut) dari dalam dan luar negeri demi menghindari pajak negara.

Lapangan pekerjaan penduduk Wakatobi paling banyak berasal dari sektor pertanian (19.376), perdagangan (8.143), jasa (6.108), lainnya (6.163) dan industri (2.438). Pada tahun-tahun terakhir terjadi peningkatan dalam investasi luar di daerah Wakatobi.<sup>38</sup> Disisi lain Wakatobi menyimpan potensi wisata laut berkelas dunia, ini mulai terlihat ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton. Kekhasan bawah laut yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional oleh pemerintah pada tahun 1996. Jauh sebelum itu, Wakatobi telah menarik perhatian masyarakat internasional, diantaranya Mr. Lorenz Mader, seorang investor berkebangsaan Swiss. Pada Tahun 1995, di pulau One Mobaa, Desa

<sup>37</sup> Laut Banda dikenal sebagai laut terdalam di Indonesia yang memiliki ombak tinggi.

<sup>38</sup> Kebanyakan toko yang menjual barang-barang industri saat ini dimiliki oleh pebisnis dari bagian lain Sulawesi, dan operasi budidaya mutiara di sekitar Kaledupa dimiliki investor-investor dari Bali Lihat: Paul Simonin, "Laporan Mengenai Resiliensi (Ketangguhan) Pedesaan: Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia", hlm. 18

Lamanggau—salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Tomia—, Mr. Lorenz merintis pendirian resort kelas dunia dengan nama Wakatobi Dive Resort (WDR). WDR beroperasi setelah mengantongi surat izin tempat usaha dari pemerintah setempat dengan nomor registrasi 17/V1/2000 yang dikeluarkan oleh Bupati Buton.

Setelah berdiri sebagai daerah otonom, sektor wisata Wakatobi tumbuh dan menjadi andalan untuk meningkatkan penghasilan daerah. Upaya tersebut dicanangkan oleh Bupati Wakatobi, Ir. Hugua melalui visi pemerintahannya yaitu "Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia". Visi ini mengadung tiga hal pokok yaitu: 1). Surga nyata adalah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta daya saing daerah yang didukung oleh situasi ketertiban dan ketentraman umum yang kondusif; 2). Bawah laut adalah perwujudan kemanfaatan dan kelestarian atas potensi sumberdaya bawah laut dan perairannya khususnya dalam hal kelautan, perikanan, pariwisata, dan lingkungan/kawasannya; 3). Pusat segi tiga karang dunia adalah aktualisasi posisi geostrategi Wakatobi, yakni pada pusat segitiga karang dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.<sup>39</sup>

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah Wakatobi mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya mempromosikan pariwisata Wakatobi di dalam dan luar negeri, menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Usaha Perdagangan, serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Wakatobi. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

### **Profil dan Sumber Daya Oligarki**

Sektor pariwisata yang mendatangkan banyak wisatawan setiap tahun mampu meningkatkan PAD dan menggairahkan ekonomi Wakatobi. Namun, secara bersamaan capaian positif tidak disertai dengan pemerataan pendapatan, yang setiap tahun pendapatan masyarakat semakin mengalami ketimpangan. Perekonomian Wakatobi dikuasai oleh para elit politik dan

<sup>39</sup> BPS, "Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2015"

ekonomi, sementara masyarakat hanya mendapat bagian kecil dari efek pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini tampak dalam pengelolaan bisnis pariwisata dan kebutuhan pendukung pariwisata, sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti: jalan, bandara, hotel, resort, kapal, alat transportasi dan lainnya dikuasai/dikelola oleh

beberapa orang. Mereka inilah yang dalam tulisan ini dinamai sebagai kelompok oligarki predatoris dan elit ekonomi yang menguasai bisnis dan sumber daya pariwisata di Wakatobi. Latar belakang mereka sangat beragam mulai dari pengusaha, politisi hingga mantan birokrat.

**Tabel. 2.** Profil Oligarki dan Elite Ekonomi di Wakatobi

Nama	Latar Belakang	Grup Bisnis/tahun pendirian	Bisnis/proyek Yang di Kelola	Sumber Daya Kekuasaan	Kewarganegaraan	Harta/Kekayaan/Pendapatan	Keterangan
<b>Hugua</b>	Aktivis	Patuno Resort & PT. Patua Insani Sapulo (Pata Pulo Travel)/	Pariwisata (resort & penyelematan) dan Travel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak politik dan ekonomi (memilih/dipilih, investasi)</li> <li>- Jabatan resmi (Bupati Wakatobi 2006-2011, 2011-2016; Ketua DPD PDI.P Sultra)</li> <li>- Kekuasaan pemaksaan (pajabat negara/aparatur negara 2006-2016)</li> <li>- Kekuasaan mobilisasi (aktivis sosial/LSM/tokoh partai)</li> <li>- Kekuasaan material (Pemilik Patuno Resort &amp; Pata Pulo Travel)</li> </ul>	Indonesia	Tidak diketahui	Aktivis yang bertransformasi menjadi elite politik dan elite ekonomi, lalu menjadi Oligarki
<b>Lorenz Mader</b>	Pengusaha	Wakatobi Dive Resort/ 1995	Pariwisata (resort dan penyelematan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak ekonomi (investasi)</li> <li>- Jabatan resmi (pemilik Wakatobi Dive Resort)</li> <li>- Kekuasaan material (Pemilik Wakatobi Dive Resort)</li> </ul>	Swiss	Pendapatan WDR sebesar 64,8 Milyar Rupiah/Tahun (data tahun 2007).	Elite ekonomi
<b>Arhawi</b>	Pengusaha	PT. Askar Saputra	Transportasi (kapal laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak politik dan ekonomi (memilih/dipilih, investasi)</li> <li>- Jabatan resmi (Wakil Bupati Wakatobi 2011-2016, Bupati terpilih Wakatobi terpilih 2016-2021; Ketua DPD PAN Wakatobi, CEO Aksar)</li> <li>- Kekuasaan pemaksaan (pejabat negara/aparatur negara 2011-2021)</li> <li>- Kekuasaan mobilisasi (tokoh partai)</li> <li>- Kekuasaan material (Pemilik Grup Aksar)</li> </ul>	Indonesia	Rp.44.150.947.948 (LHKPN Tahun 2015).	Pengusaha yang bertransformasi menjadi elite politik dan menjadi Oligarki
<b>Ceng Ceng</b>	Pengusaha / Kontraktor	PT. Golden Prima Wakatobi & Tunas Mandiri	Infrastruktur (jalan yang didanai APBD dan perluasan Apron dan Taxiway termasuk Marking Bandara Matohara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak ekonomi (investasi)</li> <li>- Jabatan resmi (pemilik Golden Prima Wakatobi &amp; Tunas Mandiri)</li> <li>- Kekuasaan material (Pemilik Golden Prima Wakatobi &amp; Tunas Mandiri)</li> </ul>	Indonesia	Tidak diketahui	Elite ekonomi
<b>Haliana</b>	Pengusaha	CV.Liya Persada (Kontraktor), UD.Rezky Abadi (Perdagangan Umum), PT. Tomia Bersinar (SPBN/PERTA MINA), Pudonggala Damai Bersinat (Transportasi Laut), Anggota plasma pada PT. Agrosawit Indonesia (Perkebunan Kelapa Sawit)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak ekonomi</li> <li>- Hak politik</li> <li>- Kekuasaan material</li> </ul>	Indonesia	Rp. 31.608.292.298948 (LHKPN Tahun 2015).	Elite ekonomi yang berusaha menjadi elite politik namun gagal (tidak terpilih)

<b>Baharudin Isa</b>	Pemilik Tanah/ Mantan Birokrat	Pihak yang memfasilitasi Lorenz menyewa Pulau One Mobaa	- Hak ekonomi - Hak politik - Kekuasaan material	Indonesia	Tidak diketahui	Mantan birokrat yang bertransformasi menjadi elite ekonomi dan memiliki pengaruh politik (anaknyanya terpilih menjadi anggota DPRD)
----------------------	-----------------------------------	---	--	-----------	-----------------	---

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber, tahun 2016.

Hugua merupakan salah satu kelompok oligarki di Wakatobi. Ia merupakan Bupati Wakatobi dua periode (2006-2011)/(2011-2016). Sebelum terpilih sebagai Bupati, Hugua merupakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pendidikan Luar Sekolah Oleh Masyarakat (HPP LSM RA) dan Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia (HILLSI). Pada dua organisasi itu, Hugua terpilih sebagai Ketua I DPD dan Ketua DPD Sultra. Semasa kuliah di Universitas Halu Oleo (UHO), Hugua terdaftar sebagai salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di organisasi internal kampus, Hugua pernah menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa FAPERTA UHO serta Koordinator Himpunan Mahasiswa Agronomi Pecinta Buku (HIPMAPBU) Sultra. Di organisasi kepemudaan Hugua pernah menjadi Ketua Departemen ICMI Sultra dan Ketua Kerukunan Keluarga Tomia di Kendari Periode 2001-2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Pengurus Masjid dan tercatat pernah menjabat sebagai Working Group ILO Periode 2001-2005.<sup>40</sup>

Keterlibatan dalam organisasi menjadikan Hugua memiliki jaringan luas, baik di dalam maupun luar negeri. Hugua kerap mengikuti kursus dan pelatihan internasional yang menjadikannya semakin fasih bahasa asing dan memiliki jaringan internasional. Semasa aktif di LSM, Hugua berhasil mendatangkan program pemberdayaan yang didanai oleh lembaga donor internasional, diantaranya program air bersih. Program ini menjadikan Hugua semakin dikenang oleh masyarakat Wakatobi.

<sup>40</sup> Suara Kendari, "Profil Hugua, Putera Terbaik Sultra Calon Menteri Kelautan di Kabinet Jokowi -JK", 3 Agustus 2014, <http://www.suarakendari.com/profil-hugua-putera-terbaik-sultra-calon-menteri-kelautan-di-kabinet-jokowi-jk.html> (diakses pada 25 Juli 2016).

Pada Pemilu 2004, Hugua berbekal kepopuleran, pengalaman organisasi dan jaringan yang dimiliki mencalonkan diri sebagai anggota legislatif provinsi Sultra, namun tidak berhasil. Meski gagal dalam pemilu legislatif, tidak menurunkan semangat Hugua menjauh dari aktivitas politik. Setahun berselang (2005), ia mencalonkan diri sebagai Bupati Wakatobi. Pencalonan ini didukung oleh koalisi PDI.P dan PPP. Pada Pilkada itu, Hugua terpilih menjadi Bupati Wakatobi. Tidak lama berselang ia dipercaya memimpin ketua DPC PDI.P Wakatobi, selanjutnya pada tahun 2010, Hugua terpilih melalui musyawarah sebagai Ketua PDI.P Sultra periode 2010-2015.

"Dipilihnya Hugua pada saat itu dianggap sangat tepat karena ia dipandang berhasil menaikan kursi PDI.P didaerahnya serta sukses memimpin Wakatobi. PDI.P berpikiran, keberhasilan di Wakatobi bisa diikuti oleh Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Tenggara. Juga Hugua merupakan kader. PDI.P juga memiliki hitungan dengan terpilihnya Hugua, posisinya sebagai Bupati dapat dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal untuk kesejahteraan rakyat dan membesarkan partai."<sup>41</sup>

Terpilihnya Hugua sebagai Ketua PDI.P Sultra, dipertemukan pada kepentingan yang hampir sama antara partai dan Hugua. Pada sisi Hugua, PDI.P sangat dibutuhkan untuk tetap mem-back-up pemerintahannya di legislatif, serta memuluskan dirinya untuk bertarung kembali pada Pemilu Wakatobi 2011. Belakangan Hugua berkepentingan mewariskan kesuksesan politik dirinya kepada keluarganya. Hal ini tampak pada pencalonan istrinya, Ratna Lada

<sup>41</sup> Pada Pemilu 2009, kursi PDI.P di Wakatobi berjumlah 5. Wawancara dengan Agus Sanaa (Wakil Sekertrais DPD PDI.P Sultra), 19 Agustus 2016, pukul 16.30 WITA.



sebagai Caleg DPR-RI dari PDI.P serta adik iparnya Nursalam Lada sebagai Caleg DPRD Provinsi. Ratna Lada gagal melenggang ke Senayan, namun adik iparnya Nursalam Lada lolos sebagai anggota DPRD Sultra dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD. Dominasi dan keberhasilan PDI.P menjadi partai penguasa (*the ruling party*) di Wakatobi, menjadi pembeda dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat.

Selama dipimpin Hugua, PDI.P Wakatobi pada Pemilu 2009 menguasai 20 % suara (5 kursi) di legislatif. Sejak menjabat Ketua PDI.P Sultra, ia berhasil memenangkan dirinya dalam Pemilukada Wakatobi tahun 2011 dan menaikan perolehan kursi legislatif PDI.P Tahun 2014 di hampir seluruh Kab/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tenggara. Di tingkat Propinsi PDI.P mendudukkan 5 wakilnya, sekaligus merebut posisi wakil ketua DPRD Provinsi. Pencapaian ini secara perlahan menjadikan PDI.P mendekati dominasi PAN, Golkar dan Demokrat di Sulawesi Tenggara.

Kesuksesan Hugua di bidang politik berlangsung pula di bidang ekonomi. Ia muncul sebagai salah satu elit politik Wakatobi yang memiliki aset dan kekayaan material besar. Di Wakatobi Hugua dikenal sebagai pemilik Patuno Resort dan Pata Pulo Travel.<sup>42</sup>

Dalam rangka mencapai kesuksesan ekonomi, Hugua melakukan berbagai strategi demi memberikan keuntungan bagi usahanya. Hugua mewajibkan kepada setiap pegawai pemerintah yang bepergian untuk menggunakan tiket yang dipesan melalui Pata Pulo Travel.<sup>43</sup> Hugua secara intens menyelenggarakan kegiatan dan promosi untuk menarik wisatawan, yang secara bersamaan terselip kepentingan bisnis Hugua yaitu terisinya resort-resort di

<sup>42</sup> Patuno Resort merupakan satu-satunya resort yang berada di ibukota Kabupaten (Wangi-Wangi). Hal ini menjadikannya sangat strategis bagi siapa saja yang berkunjung ke Wakatobi, baik untuk tujuan wisata maupun sekedar menghadiri acara pemerintahan. Untuk bisa menginap di Patuno Resort pengunjung harus menyediakan minimal Rp. 750.000 /malam. Sementara itu, Pata Pulo Travel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agen penyedia tiket pesawat.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Muhamad Daulat 5 Agustus 2016, pukul 20.30 WITA

Wakatobi, diantaranya Patuno yang merupakan resort miliknya. Sejak berdirinya Patuno Resort dan Pata Pulo Travel, Hugua seringkali mencampuradukkan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan bisnis pribadinya. Patuno Resort dan Pata Pulo Travel menjadi mesin 'pencetak uang' bagi Hugua. Kedatangan banyak pengunjung di Wakatobi selain meningkatkan PAD turut menambah akumulasi kapital Hugua dari hasil sewa wisatawan, yang menginap di Patuno Resort dan menggunakan agen perjalanan Pata Pulo Travel.

Penuturan Daryono Moane (Mantan Ketua DPRD Wakatobi/PDI.P) Patuno Resort dan Pata Pulo Travel adalah aset Hugua yang terlihat. Menurutnya Hugua juga memiliki sejumlah tanah di Wakatobi dan Kendari, serta rumah di Australia.<sup>44</sup> Wawancara dengan salah satu akademisi asal Wakatobi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Buton menceritakan hal ini:

"Semua orang sudah tahu bahwa Hugua adalah pemilik Patuno Resort dan Pata Pulo Travel. Hugua juga memiliki banyak tanah di Wakatobi dan Kendari. Ia juga memiliki rumah di Kendari."<sup>45</sup>

Penguasaan aset oleh Hugua dikonfirmasi pula Muhamad Daulat, seorang aktivis anti korupsi lokal. Daulat menyebut bahwa banyak tanah dan lahan kosong di Wakatobi dimiliki oleh Hugua yang dibeli dengan harga murah, pengambilan secara paksa dari warga serta diperoleh melalui pematokan tanah/pulau yang belum berpenghuni. Sumiman Udu seorang akademisi Universitas Halu Oleo asal Wakatobi menuturkan, pengembangan Pariwisata Wakatobi menyebabkan hilangnya tanah Sara dan memicu perlawanan masyarakat adat terhadap Negara.<sup>46</sup>

Tanah menjadi alat akumulasi dan perlindungan kekayaan para elit politik dan

<sup>44</sup> Daryono Moane, "Korupsi Bupati Wakatobi", 26 April 2013, [http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-waktobi\\_552fa49e6ea83434098b4591](http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-waktobi_552fa49e6ea83434098b4591) (diakses pada 5 Agustus 2016).

<sup>45</sup> Wawancara dengan Rasman 31 Juli 2016, pukul 20.30 WITA

<sup>46</sup> Lihat Sumiman Udu, "Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-Tanah Sara di Wakatobi: Kajian Atas Perlawanan Masyarakat Adat". Prosiding The 4<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future, Bali 9-10 Februari 2012.

ekonomi di Wakatobi. Menurut Daulat, seorang pejabat Wakatobi diduga pernah melakukan gratifikasi tanah kepada seorang petinggi Polri yang bertugas di Wakatobi demi mengamankan dirinya dari pengusutan kasus korupsi. Dugaan korupsi yang melibatkan Hugua menurut Daulat telah berlangsung sejak awal pemerintahannya.<sup>47</sup> Sementara itu dugaan korupsi yang melibatkan Hugua dihimpun oleh Wakatobi Information Agency (WAINA). Selain insentif PBB, WAINA menemukan dugaan korupsi belanja subsidi kepada perusahaan penerbangan Express Air sebesar Rp. 2.550.000.000. Kedua kasus tersebut telah dilaporkan oleh WAINA pada Kepolisian Republik Indonesia. Namun hasil penyelidikan Polri mengklarifikasi bahwa dugaan korupsi subsidi penerbangan Express Air belum ditemukan unsur pidana, sedangkan dugaan korupsi insentif PBB, Polri tidak dapat menangani dikarenakan telah diusut oleh pihak kejaksaan.<sup>48</sup> Seteru politik Hugua, Daryono Moane (mantan Ketua DPRD Wakatobi/PDI.P) mengungkapkan lebih banyak dugaan korupsi di Wakatobi, diantaranya pengadaan kapal laut, pengadaan pipa dan dana *sharing* PNPM.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Daulat bercerita bahwa pada tahun 2005 Wakatobi mendapatkan insentif pajak bumi dan bangunan dari pemerintah sebesar Rp. 1.694.218.018. Uang hasil insentif pajak ini dibagi-bagi kepada elit politik dan birokrasi Wakatobi. Bagian terbesar diperuntukan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 43 %, 22 % diperuntukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Wakatobi, asisten Setda Kabupaten Wakatobi dan Kepala Kantor pelayanan PBB Bau-Bau. Sisanya sebesar 35 % diperuntukan kepada unsur sekretaris dan anggota tim intensifikasi PBB. Instruksi pembagian insentif pajak ini merujuk pada surat perintah Bupati Wakatobi, Hugua, dengan nomor 973/334. Wawancara dengan Muhamad Daulat dan kutipan salinan Surat Perintah Bupati Wakatobi Nomor 973/334 dan lampiran

<sup>48</sup> Hasil klarifikasi POLRI atas pengaduan masyarakat. Wakatobi Informatian Agency

<sup>49</sup> 1). Proyek pengadaan kapal ikan pada TA 2007 melalui penunjukkan Bupati yang jatuh kepada Nursalam Lada (Adik Ipar Bupati) dengan total anggaran Rp. 7 miliar. Menurut Daryono, kapal tersebut tidak pernah dipakai oleh nelayan, karena sebelum serah terima kepada nelayan kapal-kapal tersebut telah rusak. 2). Dugaan korupsi pengadaan pipa untuk air minum sebesar Rp. 30 miliar yang dianggarkan pada dua APBD (APBD Kabupaten dan APBD Propinsi). 3). Tidak adanya pertanggung jawaban atas dana *sharing* PNPM yang setiap tahunnya mencapai Rp. 3 s/d 4 miliar. Daryono Moane, "Korupsi Bupati Wakatobi", 26 April 2013, [http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-wakatobi\\_552fa49e6ea83434098b4591](http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-wakatobi_552fa49e6ea83434098b4591) (diakses pada 5 Agustus 2016).

Selain itu, Hugua dikenal memiliki kedekatan dengan pengusaha Ceng Ceng, seorang kontraktor asal Bau-Bau. Di Wakatobi Ceng Ceng sangat familiar, ia dikenal sebagai kontraktor yang kerap memenangkan tender proyek.<sup>50</sup> Kehebatan Ceng Ceng ini diakui pula oleh salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan miliknya.

"Ceng-Ceng merupakan kontraktor yang telah lama bermain (menangani proyek) di Wakatobi. Proyek besar di Wakatobi selalu dimenangkan oleh Ceng Ceng. Jika ada kontraktor selain Ceng Ceng yang memenangkan tender, nilai proyeknya sangat kecil, itu sisa-sisa/buangan Ceng Ceng."<sup>51</sup>

Guna mendapatkan banyak proyek, Ceng Ceng mendirikan lebih dari satu perusahaan yaitu Golden Prima Wakatobi dan Tunas Mandiri (praktek kartel). Ia juga kerap menyewa perusahaan lain demi menghindari kecurigaan publik dan badan pemeriksa. Jenis proyek yang dikerjakan oleh Ceng Ceng diantaranya adalah jalan yang didanai oleh APBD Kabupaten dan jalan inspeksi Bandara Mataohara. Sang karyawan menuturkan, kemenangan Ceng Ceng dalam tender proyek di Wakatobi didukung oleh ketersediaan peralatan yang lengkap (alat berat, seperti: mesin pengeruk) yang tidak dimiliki oleh kontraktor lain. Bermodal kelengkapan peralatan itu, Ceng Ceng meski tidak memenangkan tender, ia seringkali diminta oleh pemenang tender (kontraktor lain) untuk mengerjakan proyek yang dimenangkan, atau sekedar meminjam peralatan melalui komitmen pembagian keuntungan. Ceng Ceng juga dianggap berpengalaman dalam mengerjakan proyek di Kepulauan Wakatobi, sejak masih bergabung dengan Kabupaten Buton.

Keunggulan Ceng Ceng lainnya adalah memiliki hubungan baik dengan para penguasa di era otonomi daerah. Hubungan baik dipelihara melalui sikap royalnya terhadap penguasa yaitu menjadi donatur pada pagelaran politik penting. Menurut karyawan yang bekerja di perusahaan

<sup>50</sup> Nama Ceng Ceng adalah nama yang dikenal oleh warga Wakatobi, saat penulis berkunjung ke Tomia disana sedang dikerjakan pengaspalan jalan kabupaten. Sang sopir bercerita bahwa proyek dikerjakan oleh Ceng Ceng, kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di Wakatobi. Wawancara dengan A, Warga Tomia, Kabupaten Wakatobi, 6 Agustus 2015, pukul 17.00 WITA

<sup>51</sup> Wawancara dengan N, 7 Agustus 2016, pukul 08.30 WITA

Ceng Ceng, ‘sang bos’ sampai tahun 2015 merupakan salah satu donatur utama Hugua dalam kegiatan politik. Perpisahan keduanya berlangsung pada Pemilu 2016, Hugua mendukung Haliana, sementara Ceng Ceng memberikan dukungan kepada Arhawi (Bupati terpilih Wakatobi periode 2016-2021).<sup>52</sup>

Arhawi merupakan Ketua DPD PAN Wakatobi dua periode, 2007-2012/2012-2017. Pada Pemilu 2009, PAN berhasil mendudukkan 3 kursi di legislatif sekaligus menempatkan Arhawi sebagai wakil ketua DPRD. Dua tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD (2009-2011), Arhawi terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Hugua. Saat menjabat sebagai Wakil Bupati, Arhawi dipercaya memimpin organisasi kepemudaan, KNPI dan Kwarcab Pramuka Wakatobi periode 2011-2015. Di partai, Arhawi tetap dipercaya memimpin PAN Wakatobi. Hasilnya pada Pemilu 2014 PAN berhasil mengirimkan 7 wakilnya di legislatif, perolehan suara PAN hanya berselisih 1 kursi dengan PDI.P, partai yang sangat dominan di Wakatobi. Kesuksesan politik Arhawi diwariskan pula pada keluarganya, Sukardi dan Hamiruddin. Kakak dan ipar Arhawi ini pada Pemilu 2014, terpilih menjadi anggota DPRD Wakatobi dari PAN.

Arhawi dan Hugua memimpin partai yang berbeda, namun keduanya sangat harmonis (tidak terlibat konflik) dalam menjalankan pemerintahan sebagai Bupati-Wakil Bupati<sup>53</sup> terkecuali menjelang Pemilu 2016. Rivalitas politik keduanya tampak ketika PDI.P dan PAN tidak lagi berkoalisi, Hugua sebagai Ketua PDI.P Sultra mendukung Haliana-Syawal, sementara PAN mendukung Arhawi untuk menjadi Bupati Wakatobi periode 2016-2021.

<sup>52</sup> Wawancara dengan N, 7 Agustus 2016, pukul 08.38 WITA

<sup>53</sup> LIPI menemukan hampir 95 persen pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga mengalami pecah kongsi atau konflik. Kementerian Dalam Negeri pernah merilis data bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2013 sebesar 94,6 persen pecah kongsi. Liputan 6, “Mendagri: 95% Kepala Daerah & Wakilnya Pecah Kongsi Tengah Jalan” 10 Maret 2014, lihat <http://news.liputan6.com/read/2020702/mendagri-95-kepala-daerah-wakilnya-pecah-kongsi-tengah-jalan> diakses tanggal 6 Agustus 2016.

Persaingan dalam Pemilu 2016 berakhir dengan kemenangan tipis Arhawi atas Haliana.<sup>54</sup>

Kemenangan Arhawi pada Pemilu 2016 tidak terlepas dari dukungan PAN dan Nur Alam sebagai pimpinan PAN saat itu dan Gubernur Sultra.<sup>55</sup> Di samping itu, Arhawi juga memiliki basis material yang setara bahkan melampaui Hugua. Jika Hugua memiliki Patuno Resort dan Pata Pulo Travel, Arhawi merupakan pemilik Askar Saputra Grup, perusahaan perkapalan yang melayani angkutan penumpang dan barang yang beroperasi di dalam dan luar Sulawesi Tenggara (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi). Grup Askar tercatat memiliki beberapa cabang perusahaan dan puluhan kapal angkut penumpang dan barang. Arhawi sebagai pemilik Grup Askar memiliki kekayaan sebesar Rp.44.150.947.948.<sup>56</sup>

Hugua dan Arhawi adalah elit politik yang juga menjadi elit ekonomi di Wakatobi. Hal yang membedakan keduanya adalah Hugua memiliki kekayaan setelah menjadi Bupati, sementara Arhawi sebelum memasuki dunia politik telah memiliki basis material besar. Arhawi memiliki latar belakang pengusaha dan pernah menjadi Ketua KADIN Wakatobi pada periode 2006-2008, sedangkan Hugua berlatar belakang aktivis. Meminjam pendapat Winters, masuknya Arhawi dalam politik merupakan bagian dari upaya menambah dan mempertahankan kekayaan<sup>57</sup>, meski hal ini tentu perlu dibuktikan hingga akhir periode kepemimpinannya sebagai Bupati.

Keberadaan Askar Saputra Grup sangat berkontribusi dalam memenangkan Arhawi

<sup>54</sup> Hasil pleno KPU Wakatobi, Pilkada Wakatobi dimenangkan oleh pasangan Arhawi-Ilmiati Daud dengan selisih 777 suara atau 0,7 persen.

<sup>55</sup> Nur Alam merupakan Ketua DPW PAN Sultra tiga periode. Tahun 2016, setelah ia tidak terpilih menjadi Ketua DPW PAN dan memilih untuk istirahat dari kepartaian. Uraian lebih lengkap tentang sosok Nur Alam, baca Eka Suaib dan La Husen Zuada, “Fenomena Bosisme Local di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol.12, No.2. 2015. Baca pula Eka Suaib dan La Husen Zuada, “Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara”, *Jurnal The Politics*. Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol. 2 No.1 Tahun 2015.

<sup>56</sup> Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang disetor di KPUD Wakatobi

<sup>57</sup> Lihat Jeffrey Winters, *Oligarki*, hlm. 18

pada Pemilukada Kabupaten Wakatobi. Laporan Bawaslu Sultra mencatat, PT. Askar Saputra Lines merupakan salah satu penyumbang biaya kampanye Arhawi.<sup>58</sup> Kapal milik PT. Askar Saputra menjadi alat pertukaran suara antara kandidat dan pemilih (klientalisme). Pola klientalisme yang dipraktekan yaitu dengan menggratiskan atau memotong tiket penumpang pengguna kapal milik Arhawi (PT. Askar Saputra).<sup>59</sup> Kapal Arhawi pada saat Pemilukada digunakan sebagai alat intimidasi bagi penduduk yang berbeda pilihan politik. Sebuah surat kabar memberitakan tindakan intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan yaitu larangan naik kapal dan pengusiran penumpang PT. Askar yang tidak berpihak pada salah satu calon bupati.<sup>60</sup>

Lebih lanjut menurut salah satu fungsionaris PDI.P Sultra, pada Pilkada 2015 kapal milik Arhawi digunakan sebagai alat mobilisasi pemilih (mendatangkan pemilih) dari luar daerah. Para pemilih ini adalah orang-orang Wakatobi yang merantau ke Indonesia bagian timur seperti, Papua, Taliabu dan Maluku.<sup>61</sup> Mobilisasi pemilih dari luar daerah merupakan salah satu pola yang ditemukan oleh Bawaslu Sultra pada penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015.<sup>62</sup> Saat Pemilukada, para penduduk Wakatobi yang berada di luar daerah (merantau) kembali ke Sultra dengan alasan pulang kampung. Diantara mereka ada yang telah memiliki KTP dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), maka dengan pulang kampung mereka bisa memilih. Ada pula yang memiliki KTP tapi tidak tercatat dalam DPT, maka berdasarkan PKPU No. 10 Tahun

<sup>58</sup> Bawaslu Sultra, "Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Sultra", 2016, hlm. 76

<sup>59</sup> Salinan putusan MK. Nomor 117 PHP-BUP-XV/2016, tentang sidang sengketa Pilkada Wakatobi Tahun 2015, hlm. 8

<sup>60</sup> Kompas, "Penumpang diturunkan dari kapal gara-gara beda pilihan", 5 Januari 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/05/15094811/Penumpang.Mengaku.Diturunkan.dari.Kapal.gara-gara.Beda.Pilihan.di.Pilkada> (diakses pada 6 Agustus 2016).

<sup>61</sup> Wawancara dengan Agus Sanaa, 22 Agustus 2016, jam 16.30 WITA. Fenomena mobilisasi pemilih dari luar daerah di Wakatobi pernah terungkap dalam Pemilukada tahun 2011. Lihat Putusan MK Nomor 40/PHPU.D-Ix/2011 tentang sidang sengketa Pilkada Wakatobi Tahun 2011, hlm. 8

<sup>62</sup> Wawancara dengan Munsir Salam, Komisioner Bawaslu Sultra, 28 Juni 2016, pukul 09.30 WITA

2015 mereka berhak untuk memilih. Bagi mereka yang belum memiliki KTP, maka dibuatkan KTP baru.

Selain Hugua dan Arhawi, nama lain yang cukup dikenal di Wakatobi adalah Mr. Lorenz Mader, pemilik Wakatobi Dive Resort (WDR) yang berlokasi di Pulau One Mobaa, Desa Lamanggau Kecamatan Tomia. Lorenz biasa disapa merupakan warga negara Swiss yang berinvestasi di Wakatobi. Lorenz merintis berdirinya WDR sejak tahun 1995 dan mendapatkan izin dari Bupati Buton lima tahun kemudian (tahun 2000). Kehadiran WDR cukup kontroversial dikalangan masyarakat, pemerintah dan pihak keamanan. Pro kontra masyarakat terkait keberadaan WDR diantaranya menyangkut sewa lahan yang dipersoalkan oleh pemilik lahan<sup>63</sup>, kontribusi bagi masyarakat sekitar, larangan terhadap nelayan setempat untuk mencari ikan, pelanggaran ketanagakerjaan dan ancaman keamanan/kedaulatan negara.

Menurut salah satu ahli waris pemilik lahan yang disewa oleh Lorenz, surat perjanjian sewa menyewa lahan milik warga dilakukan secara ilegal dan penuh manipulasi.

"Lorenz menyewa lahan warga tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Pemilik lahan tiba-tiba dikirimkan/serahkan akta notaris yang telah ditanda tangani dan menyebutkan bahwa lahan tersebut telah disepakati untuk disewa oleh Lorenz selama 30 tahun. Akta notaris itu mengagetkan kami, karena orang tua dan ahli waris tidak pernah menanda tangani apalagi menyetujui sewa lahan tersebut. Kami kemudian menyapaikan protes pada pemerintah setempat. Namun saya justru mendapatkan ancaman kekerasan dari preman dan keluarga Baharudin Isa (mantan Camat Tomia) dengan menuduh saya telah mencemarkan nama baik orang tua mereka (Baharudin Isa). Atas peristiwa tersebut, saya diamankan oleh keluarga".<sup>64</sup>

Penuturan warga setempat, lahan mereka disewa oleh Lorenz melalui perjanjian yang dibuat oleh Camat. Pemilik lahan tidak pernah mengetahui isi perjanjian antara Lorenz dan

<sup>63</sup> Lihat Marwan, *Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Wakatobi*. (Skripsi: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 92

<sup>64</sup> Wawancara dengan S, 8 Agustus 2016, pukul 21.00 WITA

Camat. Atas bantuan Camat pula Lorenz menggunakan lahan di Pulau Tomia sebagai lokasi berdirinya lapangan terbang (Lapter) Maranggo, tempat pendaratan pesawat milik Lorenz.<sup>65</sup> Setiap seminggu sekali pesawat milik Lorenz membawa wisatawan langsung dari Bali, tanpa melalui bandara Mataohara, Wakatobi. Dengan itu, Pemda Wakatobi mendapatkan sedikit keuntungan atas keberadaan bandara tersebut, kecuali sewa tanah yang diterima langsung oleh pemilik tanah. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, keberadaan WDR menyumbang PAD sebanyak 106 juta pada tahun 2002 dan setiap tahun terus mengalami peningkatan.<sup>66</sup> Para wisatawan untuk bisa menginap dan menikmati fasilitas WDR dikenakan biaya Rp. 4.500.000 /malam.<sup>67</sup>

Dari sisi keamanan dan kedaulatan Negara penguasaan lapangan terbang oleh orang asing sangat membahayakan. Lapangan terbang merupakan salah satu infrastruktur vital dalam pertahanan sebuah wilayah/negara. Lapter menjadi pintu masuk sebuah wilayah, sehingga pengawasan negara terhadap lapangan terbang tidak kalah vital. Pada saat penulis melakukan observasi di Tomia, menemukan begitu eksklusifnya Lapter Maranggo dan WDR, hanya atas izin Lorenz untuk bisa mengaksesnya. Para tamu WDR juga eksklusif, ketika mendarat di Lapter Maranggo telah disediakan mobil dan kapal khusus untuk mengangkut orang dan barang para tamu WDR, tanpa melalui pemeriksaan aparat keamanan atau otoritas lainnya. Para tamu WDR juga tidak membaur dengan masyarakat, seperti wisatawan pada umumnya yang kerap mengunjungi tempat-

<sup>65</sup> Kepemilikan Tanah di lokasi Lapter Maranggo kontroversial. Pada tahun 2009 seorang warga bernama L.M. Urufi Prasad,SH.,MH (ahli waris pemilik tanah) menggugat Lorenz, Bupati Wakatobi, Bupati Buton. Ketua DPRD Wakatobi, Ketua DPRD Buton dan Camat Tomia atas penggunaan lahan milik orang tua penggugat dan warga Tomia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 21 Desember 2011 [file:///C:/Users/hp/Downloads/2326\\_K\\_Pdt\\_2011.pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/2326_K_Pdt_2011.pdf) (diakses pada 6 Agustus 2016).

<sup>66</sup> Lihat Nur Ayu, Zulkhair Burhan, Beche BT. Mamma, "Dampak Investasi Pt. Wakatobi Dive Resort Pada Sektor Pariwisata One Mobaa Serta Potensi Perkembangan Ekonomi Masyarakat Lamanggau", *Jurnal Paradigma*. Vol. 003, Nomor 003, Juli 2015, hlm. 296.

<sup>67</sup> Wawancara dengan A, Warga Tomia, Kabupaten Wakatobi, 7 Agustus 2015, pukul 08.00 WITA

tempat umum atau warga. Di WDR, wisatawan sangat terjaga hak-hak individu dan privasinya, tanpa ada yang mengganggu. Inilah menjadikan WDR menjadi salah satu tujuan wisata favorit. Penuturan seorang warga menyebut, antusiasme wisatawan yang ingin ke WDR mirip dengan antrian yang ingin naik haji.<sup>68</sup>

Lorenz sangat berkuasa, ia melarang dan mengusir nelayan setempat yang mencari ikan di sekitar resort miliknya. Penuturan Muhamad Daulat, Kapolda Sultra pernah suatu ketika memasuki wilayah Tomia dan hendak berlabuh di pelabuhan milik Lorenz namun tidak dibolehkan. Sikap WDR membuat Kapolda marah dan memerintahkan jajarannya menyelidiki sikap eksklusif WDR, namun pengusutan itu tidak dilanjutkan, setelah Kapolda mendapatkan surat dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.<sup>69</sup> Selain memiliki relasi dengan oknum pemerintah pusat, Lorenz memiliki hubungan bisnis dengan tokoh lokal Tomia (Baharudin Isa). Mantan camat Tomia ini merupakan tokoh yang memfasilitasi Lorenz dalam penyewaan tanah di lahan bisnis miliknya. Atas hal itu, masyarakat Tomia mengenal Baharudin Isa sebagai pemilik pulau One Mobaa (lokasi berdirinya WDR). Baharudin Isa juga dikenal sebagai orang kaya di Tomia, berkat ketokohan dan kekayaan yang dimilikinya menjadikan ia sangat disegani. Hal ini pula yang menjadikan anaknya, Ariati terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada Pemilu 2014 lalu. Masyarakat Tomia mengenal Ariati sebagai anak Baharudin Isa yang sempat menempuh kuliah jurusan kesehatan masyarakat, namun ia tidak menyelesaikan karena terpilih menjadi anggota DPRD. Pada Pemilu 2014, Ariati menjadi anggota legislatif mewakili PAN, partai yang dipimpin oleh Arhawi di Wakatobi dan Nur Alam di Sulawesi Tenggara.<sup>70</sup> Nur Alam dan Arhawi saat kampanye Pemilukada Wakatobi 2015 di Tomia menginap di WDR

<sup>68</sup> Wawancara dengan D, aktivis Tomia, 21 Oktober 2016, pukul 13.00 WITA

<sup>69</sup> Wawancara dengan Muhamad Daulat, 5 Agustus 2016, pukul 21.00

<sup>70</sup> PAN merupakan peraih kursi terbanyak kedua di Wakatobi (dibawah PDI.P). Sejak 2006 sampai saat ini PAN Wakatobi diketuai oleh Arhawi. Sementara Nur Alam merupakan Ketua DPW PAN Sultra hingga tahun 2016.

milik Lorenz. Keterbukaan WDR menerima tamu yang masuk lewat Wakatobi diluar kebiasaan atau prosedur yang lazim berlangsung selama ini, mengingat menurut cerita warga Tomia yang bekerja di WDR, untuk bisa menginap di WDR harus melakukan registrasi (pintu masuk) di Bali. Dari Bali kemudian para wisatawan diantar menggunakan pesawat milik Lorenz.<sup>71</sup>

Pemerintah Wakatobi tampak lemah menghadapi Lorenz. Dugaan pelanggaran UU ketenagakerjaan oleh WDR tidak mendapatkan sanksi apapun dari pemerintah.<sup>72</sup> Pemerintah Wakatobi juga gagal memberikan perlindungan pada warganya. Ancaman dan intimidasi terhadap nelayan oleh WDR masih terus berlangsung. Pelarangan nelayan oleh WDR sangat berdampak pada komunitas suku Bajo Lamanggau.<sup>73</sup>

Pada sebagian masyarakat Lamanggau dan Tomia, Lorenz mendapat dukungan dan sebagian masyarakat yang lain mentang. Masyarakat pendukung Lorenz beranggapan bahwa WDR sangat berkontribusi bagi kampung mereka berupa ketersediaan listrik, lapangan kerja dan pendapatan desa. Untuk diketahui, di Desa Lamanggau, Lorenz memberikan kompensasi berupa lampu penerangan (listrik) secara gratis kepada masyarakat yang bersumber dari listrik WDR. Listrik yang diberikan WDR dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat Lamanggau dari pukul 18.00-24.00. Bahkan menurut penuturan warga Lamanggau, Lorenz bersedia menambah jam pasokan listrik menjadi 12 jam, asal warga Lamanggau menyanggupi permintaan Lorenz untuk menambah luas lahan yang dikuasai/sewa oleh WDR. Sebaliknya bagi mereka yang kritis terhadap WDR, Lorenz mengancam memutus aliran listrik.

Selain listrik, Lorenz juga memberikan kompensasi uang kepada pemerintah desa yang berdekatan dengan WDR. Setiap Desa mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 5.000.000 /bulan. Hal ini diakui oleh para Kepala Desa di Lamanggau, Dete dan Kahiyanga.<sup>74</sup> WDR juga dipandang mendatangkan pekerjaan bagi warga, meski hanya sebagai pegawai rendahan. Jajaran pimpinan dan pengelola WDR berasal dari luar Wakatobi.<sup>75</sup> Asal-usul Lorenz sebagai warga asing tidak dipersoalkan oleh masyarakat Tomia. Lorenz dianggap sebagai bagian dari masyarakat Wakatobi, setelah ia menikah dengan perempuan asal Tomia.<sup>76</sup>

Upaya Pemda Wakatobi meredam dominasi dan ekspansi Lorenz di Lamanggau, dilakukan dengan mendirikan resort di sekitar (bersampingan) WDR. Akan tetapi resort yang dibangun Pemerintah Wakatobi ini kalah bersaing dengan WDR, yang tersisa adalah bangunan yang tidak terawat. Sebaliknya, WDR semakin berkembang berkat perlindungan politik lebih kuat, pengunjung yang terus meningkat, kekayaan material lebih banyak (aset perusahaan), fasilitas yang lengkap dan berstandar internasional serta manajemen perusahaan yang modern. Keunggulan yang dimiliki WDR berhasil mengokohkan kekuasaan Lorenz atas tanah dan laut pulau One Mobaa, memunculkan polarisasi antar warga serta membungkam suara kritis warga desa sekitar

<sup>71</sup> Wawancara dengan D, aktivis Tomia, 21 Oktober 2016, pukul 13.00 WITA

<sup>72</sup> Pelanggaran perburuan di WDR terungkap setelah adanya demonstrasi para buruh yang bekerja di WDR pada tanggal 1 Agustus 2011. Sebuah sumber menyebut perlakuan yang kurang menyenangkan dari perusahaan atau pelanggaran hak pekerja di PT. Wakatobi Dive Resort sudah berlangsung sejak tahun 1996. Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut hak-hak normatif sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia seperti menuntut gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), pemberlakuan upah lembur, cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan bagi perempuan, pemberlakuan shift jam kerja, kontrak kerja serta hak libur hari raya. Lihat Nur Ayu, Zulkhair Burhan, Beche BT. Mamma, *Op.cit.*, hlm. 299. Lihat pula tulisan Ismmar Indarsyah, "Nasib Tragis Buruh PT. Wakatobi Dive Resort", 13 Maret 2012, [http://www.kompasiana.com/ismarindarsyah/nasib-tragis-buruh-pt-wakatobi-dive-resort\\_550e7759813311e82cbc6522](http://www.kompasiana.com/ismarindarsyah/nasib-tragis-buruh-pt-wakatobi-dive-resort_550e7759813311e82cbc6522) (diakses pada 6 Agustus 2016).

<sup>73</sup> Saat observasi, penulis berkesempatan wawancara dengan mereka. Melalui wawancara itu, mereka (Orang Bajo) tampak ketakutan menjawab setiap pertanyaan. Akibat larangan WDR, Orang Bajo Lamanggau mengeluhkan kehidupan dirasa semakin sulit. Namun mereka tidak mampu melawan Lorenz yang mengintimidasi melalui orang-orang lokal yang mendukung Lorenz dan ancaman pemutusan saluran listrik.

<sup>74</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Desa Lamanggau, Dete dan Kahiyanga, 5-7 Agustus 2016

<sup>75</sup> Pimpinan perusahaan (WDR) setingkat manajer berasal dari luar Wakatobi (orang Bali). Posisi tertinggi yang dijabat oleh orang lokal adalah kepala keamanan (Satpam). Selain sebagai Satpam, penduduk local dipekerjakan sebagai buruh cuci, buruh masak dan tukang kebersihan. Observasi 7 Agustus 2015, pukul 14.00 WITA.

<sup>76</sup> Wawancara dengan A, Warga Tomia, Kabupaten Wakatobi, 7 Agustus 2015, pukul 08.00 WITA

lokasi WDR. Disisi lain, atas penguasaan pulau One Mobaa, Lorenz dipandang melanggar dan mengancam kedaulatan wilayah, diantaranya berkaitan dengan keberadaan bandara dan penguasaan pulau One Mobaa. Suatu ketika, pada tahun 2008 Pulau One Mobaa berganti menjadi pulau Lorenz. Peristiwa ini berawal setelah info cellular ponsel masyarakat dan wisatawan yang berkunjung atau hanya sekedar melewati batas resort One Mobaa bertuliskan pulau Lorenz.<sup>77</sup> Saat penulis berkunjung di Tomia, penyebutan pulau Lorenz ini lebih populer dibanding pulau One Mobaa.

### Dampak oligarki dan Eite Penentu dalam Pembangunan Perdesaan

Hugua dan Arhawi merupakan kelompok oligarki di Wakatobi. Mereka menguasai sumber daya politik dan perekonomian Wakatobi. Mereka mempertahankan pendapatan dan menambah kekayaan dengan bersandar pada kekuasaan dan jejaring politik yang mereka miliki. Diantara mereka bersaing satu sama lain, kadang menjadi teman dan juga lawan, namun tidak saling meniadakan, sehingga kelompok oligarki ini tetap bertahan. Selain mereka, konstalasi politik dan ekonomi di Wakatobi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elite penentu seperti elite ekonomi, birokrat dan aktivis. Elite ekonomi di Wakatobi diantaranya ada pada Lorenz dan Ceng Ceng, sedangkan elite birokrat yang bertransformasi menjadi elite ekonomi ada pada mantan birokrat seperti: Baharudin Isa, elite aktivis ada pada Muhamad Ali Tembo. Bertahannya kelompok oligarki dan elite ekonomi memberikan dampak positif maupun negatif bagi pembangunan kawasan perdesaan Wakatobi.

*Pertama*, menggairakan per-ekonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Wakatobi bila dilihat dari struktur PDRB, pertanian merupakan sektor paling berperan. Meski demikian kontribusi PDRB berdasarkan pembagian pada tiga sektor—primer (pertanian dan penggalian), sekunder (industri, listrik dan bangunan) dan tersier (perdagangan, hotel, restoran, keuangan

<sup>77</sup> Saat penulis berkunjung ke Desa Lamanggau lokasi WDR berdiri tepat berada disebelah selatan Pulau Tomia yang berhadapan dengan pelabuhan Usuku. Pulau yang oleh masyarakat Tomia dikenal sebagai pulau One Mobaa, kini penyebutannya telah berganti menjadi pulau Lorenz.

dan jasa-jasa)—, tersier berkontribusi paling besar terhadap PDRB Wakatobi (52,37 %), disusul sektor primer (33,16 %) dan sektor sekunder (10,15 %).<sup>78</sup>

Sektor primer mempekerjakan banyak orang namun minim modal (padat karya), sebaliknya sektor sekunder dan tersier mempekerjakan sedikit orang namun memiliki modal besar (padat modal). Sektor sekunder dan tersier di Wakatobi dikuasai oleh kelompok oligarki dan elit ekonomi. Sektor jasa misalnya: resort—Patuno dan WDR—, hotel dan penginapan milik Hugua dan Lorenz. Sektor konstruksi dikelola oleh Ceng Ceng dan sektor transportasi dimiliki oleh Arhawi (PT. Askar Saputra) dan Hugua (Pata Pulo Travel). Penguasaan sektor yang padat modal dan minim tenaga kerja oleh kelompok oligarki dan elite ekonomi, menjadi pemicu ketimpangan pendapatan di Wakatobi.

Meski hal itu, tidak dipungkiri keberadaan kelompok oligarki dan elit ekonomi ikut menumbuhkan perekonomian daerah. Pada tahun 2008-2012, perekonomian Wakatobi tumbuh mendekati 10 %, ini sejalan dengan peningkatan IPM diatas rata-rata.<sup>79</sup> Pertumbuhan ekonomi Wakatobi ditunjukkan dengan peningkatan PDRB setiap tahun.

**Tabel. 3.** PDRB Wakatobi Tahun 2012-2014

Sektor Perekonomian	2012	2013*	2014**
Pertanian	510.397.05	546.607.07	584.489.82
Penggalian	327.336.37	346.722.28	361.430.46
Industri Pengolahan	83.960.55	90.193.18	101.772.57
Listrik & Air Bersih	5.514.26	6.076.70	6.672.92
Bangunan	279.025.44	304.734.48	332.608.71
Perdagangan, Hotel dan Restoran	267.310.76	294.777.36	320.274.73
Transportasi, komunikasi	52.548.91	57.035.22	59.458.35
Keuangan, R. Estate & Jasa persewahan	80.191.38	84.368.09	90.898.75
Jasa kemasyarakatan sosial	283.410.40	306.745.97	339.516.81
PDRB	1,889,695.12	2,037,260.37	2,197,123.11

Sumber: BPS Wakatobi 2016.

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

*Kedua*, peningkatan kunjungan wisata. Upaya pemerintah Wakatobi menggenjot sektor

<sup>78</sup> Pemerintah Daerah Wakatobi, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2014”, hlm. 22.

<sup>79</sup> IPM diatas rata-rata tetap menjadi catatan karena secara peringkat dan capaian, IPM Wakatobi masih berada dibawah rata-rata provinsi dan menduduki peringkat 10 terendah dengan perolehan 66,95 pada tahun 2014

pariwisata dan sejumlah bisnis yang dimiliki oleh kelompok oligarki dan elit ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi, sehingga memberikan multiplier efek pada peningkatan PAD dan PDRB setiap tahunnya.

**Tabel. 4.** Jumlah Kunjungan Wisata dan PAD Wakatobi

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata	PAD (dalam juta Rp)
2010	6793	-
2011	7698	-
2012	6332	415 190,58
2013	12370	482 495,68
2014	14270	535,111.13

Sumber: BPS (diolah kembali oleh peneliti).

*Ketiga*, membuka lapangan pekerjaan baru. Secara umum serapan lapangan pekerjaan selama sepuluh tahun terakhir (2006-2015) di Wakatobi mengalami peningkatan (6,56 %). Meski demikian secara parsial ada yang mengalami penurunan, seperti sektor pertanian (20,46 %), perdagangan (20,34 %), keuangan dan persewahan (49,49 %).

**Tabel. 5.** Perkembangan Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Orang), di Wakatobi, 2000,2006, 2015.

No	Lapangan Usaha	2006	2015
1	Pertanian	23,566	18,743
2	Penggalian	486	1,368
3	Industri	1,582	1,875
4	Listrik, Air	54	-
5	Konstruksi	972	3,021
6	Perdagangan, akomodasi	5,889	4,691
7	Transportasi, komunikasi	2,425	3,350
8	Keuangan, persewahan	396	200
9	Jasa kemasyarakatan sosial	3,499	8,173
10	Lainnya	-	-
	Total (Orang)	38,869	41,421

Sumber: BPS (diolah kembali oleh penulis)

Sebaliknya kenaikan terjadi pada sektor penggalian (281,48 %), industri (118,52 %), konstruksi (310,80 %), transportasi dan komunikasi (138,43 %), jasa (233,58 %). Kenaikan ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Wakatobi yang memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata, yang membutuhkan daya

dukung dari sektor konstruksi, transportasi dan jasa-jasa milik para oligarki dan elit ekonomi.

*Keempat*, kemudahan akses transportasi. Bisnis para oligarki dan elite ekonomi berkontribusi pada peningkatan alat dan jaringan transportasi di Wakatobi selama sepuluh tahun terakhir.

**Tabel. 6.** Alat & Jaringan Transportasi di Wakatobi Tahun 2006- 2015

No	Alat dan jaringan Transportasi	Tahun 2006	Tahun 2015
1	Jalan (km)	284,30	419.010*
2	Bandara/Lapter	1	2**
3	Dernaga/Pelabuhan	-	24
4	Angkutan pedesaan (unit)	-	139
5	Angkutan penyebarangan (unit)	-	17
6	Kendaraan Bermotor	2176	2778

Sumber: BPS (Diolah kembali)

\*Kondisi jalan baik (24,63 %), sedang (14,99 %), rusak (20,86 %), rusak berat (5,27 %), tidak terinci (34,22 %).

\*\* Bandara/Lapter yaitu Bandara Mataohara milik Pemda Wakatobi dan Lapter Maranggo milik Lorenz.

Ketersediaan sarana transportasi menjadikan wilayah Wakatobi mudah diakses. Keberadaan Bandara Mataohara mempercepat waktu tempuh menuju dan dari Wakatobi. Keberadaan dermaga dan kapal milik PT. Askar Grup ikut memperlancar mobilitas barang dan orang, ini ditandai dengan peningkatan arus penumpang selama delapan tahun terakhir. Berbeda dengan itu, arus barang justru mengalami penurunan bobot. Hal ini dipicu oleh keberadaan sektor industri di Wakatobi yang terus tumbuh, sehingga secara perlahan mampu memproduksi barang yang diperlukan oleh masyarakat lokal.

**Tabel. 7.** Arus Penumpang dan Barang di Wakatobi Tahun 2006 dan 2014

Tahun	Penumpang		Barang	
	Naik (orang)	Turun (orang)	Bongkar (Ton)	Muat (Ton)
2006	52.867	60.865	13.672	2.182.325
2014	121.703,00	122,946,00	895,88	849,38

Sumber: BPS (Diolah kembali oleh penulis)



Tingginya mobilitas menuju dan dari Wakatobi tidak terlepas dari ketersediaan alat dan jaringan transportasi. Meskipun hal itu tetap menjadi catatan, kondisi daratan—jaringan jalan—tidak lebih baik dari infrastruktur laut. Persentase jalan baik pada tahun 2015 hanya 24,63 %, selebihnya mengalami kerusakan dalam kategori sedang hingga buruk.

**Tabel. 8.** Peringkat Daya Saing Infrastruktur dan SDA di Wakatobi Tahun 2007

Nama Kabupaten/ Kota	Peringkat Daya Saing Infrastruktur dan SDA
Kabupaten Buton	VIII
Kabupaten Muna	V
Kota Bau-Bau	IV
Kabupaten Wakatobi	X
Kabupaten Konawe	I
Kota Kendari	III
Kabupaten Kolaka	II
Kabupaten Konawe Selatan	IX
Kabupaten Bombana	VI
Kabupaten Kolaka Utara	VII

Sumber: Penelitian Ira Irawati dkk, 2007.

Studi Ira Irawati dkk<sup>80</sup> pada tahun 2007 menyebut, kondisi daya saing infrastruktur di Wakatobi masih tertinggal dibanding daerah lain di Sulawesi Tenggara. Suasana itu tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan penulis ketika berkunjung ke Wakatobi pada tahun 2015.

*Kelima*, mendorong gairah usaha baru yang ditandai dengan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Keunggulan sektor pariwisata dan kemudahan akses di Wakatobi ikut mempengaruhi perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta jumlah (orang) bekerja di sektor tersebut.

<sup>80</sup> Ira Irawati Dkk, "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal J@TI Undip*, Vol VII, No 1, Januari 2012.

**Tabel. 9.** Perkembangan UMKM di Wakatobi Tahun 2011 dan 2013

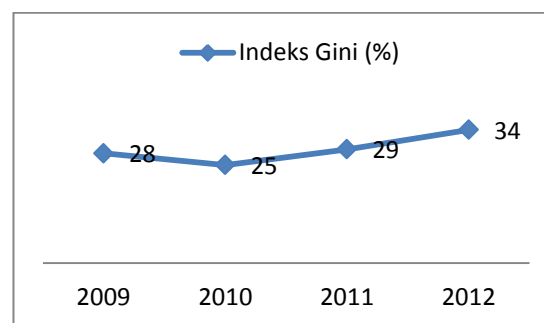
Tahun	Jumlah Usaha			Tenaga Kerja		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
2011	4.595	395	71	7.209	1.308	329
2013	5.406	374	128	7.925	1.200	494

Sumber: Profil Perekonomian Wakatobi 2014

Tabel di atas menampilkan, jumlah usaha dan tenaga kerja sektor usaha mikro dan menengah meningkat, sebaliknya usaha kecil mengalami penurunan.

*Keenam*, oligarki memperlebar kesenjangan pendapatan masyarakat. Wakatobi mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, namun hal ini tidak berpengaruh secara nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran. Sebuah laporan analisis pembangunan Sulawesi Tenggara mengkategorikan Wakatobi sebagai daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth less-pro poor* dan *high-growth, less-pro job*).<sup>81</sup> Pertumbuhan ekonomi tinggi Wakatobi tidak disertai dengan pemerataan pendapatan.

**Gambar. 1.** Indeks Gini Wakatobi 2009-2012



Sumber: BPS 2016 (diolah kembali oleh penulis)

Berdasarkan perhitungan BPS, rasio gini atau indeks ketimpangan pendapatan masyarakat Wakatobi mengalami peningkatan dari tahun ketahun.<sup>82</sup> Grafik di atas menampilkan ketimpangan pendapatan di Wakatobi semakin

<sup>81</sup> Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014, Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015, hlm. 4-7

<sup>82</sup> Gini rasio membagi ketimpangan pengeluaran penduduk dalam tiga kategori yaitu jika  $G < 0,3$  berarti ketimpangan rendah, jika  $G \leq 0,5$  berarti ketimpangan sedang, jika  $G > 0,5$  berarti ketimpangan tinggi.

lebar. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sedang, butuh 17 poin untuk dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Jika indeks ketimpangan terus meningkat, maka ini sangat membahayakan bagi kestabilan sosial politik di Wakatobi. Gejala ketidakstabilan sosial itu setidaknya terlihat pada munculnya konflik perburuhan dan agraria yang melibatkan tiga pihak, yaitu: warga, pemerintah dan swasta di Wakatobi (lihat tabel 9).

*Ketujuh*, mahalannya harga tanah dan keterbatasan jumlah lahan. Kehadiran para investor pariwisata secara perlahan mengurangi penguasaan lahan oleh warga, akibat banyaknya tanah yang berpindah tangan (dijual) oleh orang perorang kepada pengusaha pariwisata. Kesaksian Sumiman Udu menyebut, hampir 30 % tanah-tanah rakyat yang ada di wilayah Longa, Patuno, Togo dan Wanci telah dijual kepada pendatang dan yang punya uang untuk sekedar membeli motor, *handphone* dan penukaran untuk jaminan lulus CPNS.<sup>83</sup>

*Kedelapan*, kesulitan hidup nelayan. Sektor perikanan yang juga mempekerjakan banyak orang mengalami hambatan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Penelusuran Sumiman Udu<sup>84</sup> dan studi yang dilakukan oleh Paul Simonin menyebut, nelayan yang bermukim di sekitar lokasi wisata dan zona pemanfaatan (suku Bajo) mengalami penurunan produktivitas dan kesulitan untuk bertahan hidup, sebagaimana dimuat dalam penuturan nelayan berikut:

“Masalah utama yang kami hadapi adalah kami menangkap ikan lebih sedikit daripada yang biasa kami tangkap. Kami perlu ikan untuk bertahan hidup. Setiap orang di sini menangkap ikan.”<sup>85</sup>

Masalah yang dialami nelayan ini dikarenakan adanya larangan dari para pengusaha dan pemerintah untuk menangkap ikan di sekitar resort milik investor, serta adanya zona larangan

yang ditetapkan oleh pemerintah Wakatobi dan Taman Nasional.

Pembatasan wilayah laut ini bertentangan dengan adat kebiasaan orang Wakatobi yang menjadikan wilayah pantai sebagai ruang publik mereka. Tak heran kemudian upaya pemerintah untuk menjadikan Wakatobi sebagai Badan Otoritas Pariwisata (BOP) ditentang oleh warga, karena dipandang akan semakin meminggirkan dan memiskinkan mereka.

*Kesembilan*, oligarki memunculkan konflik antara warga, pemerintah dan swasta. Konflik ini diantaranya menyangkut konflik lahan/tanah dan perburuhan. Tanah merupakan salah satu asset penting dalam meningkatkan produksi. Kelangkaan tanah akan menimbulkan konflik. Potensi konflik lahan di Wakatobi sangat mungkin terjadi, selain dikarenakan wilayah ini didominasi oleh lautan (97%) dan daratan (3%)<sup>86</sup>, juga dipicu oleh penyerobotan dan penguasaan lahan oleh para oligarki untuk mendirikan resort, seperti: Patuno Resort dan Wakatobi Dive Resort.<sup>87</sup>

**Tabel 10.** Konflik Warga, Pemerintah dan Swasta di Wakatobi.

Tahun	Pihak terlibat	Uraian dan Jenis Konflik
2011	Buruh dan PT. WDR	Tuntutan hak buruh (upah) dan pelanggaran UU Ketenagakerjaan
2004-saat ini	Masyarakat Lamanggau dan PT. WDR	- Larangan terhadap nelayan untuk menangkap ikan di sekitar lokasi WDR. - Sewa menyewa lahan milik warga tempat Lapter Maranggo dan lokasi berdirinya WDR.
2007-2010	Masyarakat (Desa Matohara dan Desa Longa) dan Pemerintah	Konflik pembebasan lahan bandara Mataohara
2010	Masyarakat (Desa Matohara dan Liya) dan pemerintah	Konflik ganti rugi lahan pembangunan sekolah Internasional 'School For Marine Protected Area
2010	Masyarakat (desa Sombu) dan investor	Rencana pembangunan perumahan Rencana proyek PLTU
2015	Masyarakat dan pemerintah	Penolakan warga terhadap Badan Otoritas Pariwisata

Sumber: data diolah oleh penulis

<sup>83</sup> Lihat: Sumiman Udu, *Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-Tanah Sara di Wakatobi: Kajian Atas Perlawanan Masyarakat Adat*, hlm. 879

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 878

<sup>85</sup> Paul Simonin, *Laporan Mengenai Resiliensi (Ketangguhan) Pedesaan: Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia*, hlm. 14

<sup>86</sup> Buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Wakatobi menyebut wilayah Wakatobi terdiri atas 97 % lautan dan 3 % darat. (Tim, 2008: Bab III-15).

<sup>87</sup> Konflik lahan di Wakatobi yang terbaru adalah adanya penolakan masyarakat tentang Badan Otoritas Pariwisata. Menurut warga BOP akan mengurangi hak-hak mereka atas lahan dan sumber kehidupan mereka sebagai nelayan.

Keberadaan resort para oligarki tidak hanya mengurangi luas tanah milik warga, namun juga membatasi ruang gerak mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Para petani dan nelayan dilarang untuk mencari ikan dan berkebun, akibatnya konflik menjadi sering terjadi. Disisi lain, keberadaan oligarki juga memicu konflik perburuhan akibat pelanggaran hak-hak buruh oleh perusahaan milik kaum oligarki, sebagaimana dialami oleh buruh yang bekerja di Wakatobi Dive Resort. Konflik juga sangat mungkin terjadi diantara pemangku kepentingan di bidang pariwisata yang memiliki modal kecil dan modal besar.<sup>88</sup>

*Kesepuluh*, oligarki berusaha mempertahankan kekayaan dengan membangun dinasti. Mereka mengusung istri, ipar, saudara sebagai anggota legislatif. Sementara elite ekonomi menjalin hubungan baik dengan elit politik lokal dan kelompok oligarki, demi menjaga kelangsungan usaha mereka, diantaranya menjadi donatur dalam kegiatan politik penting dan menyediakan fasilitas bagi para elite politik saat kampanye.

## Penutup

Kehadiran desentralisasi dan otonomi daerah memberikan perubahan politik, sosial dan ekonomi di Wakatobi. Pada era otonomi daerah elit lama (*old elite*) yang berasal dari kaum bangsawan (kaomu) secara perlahan digantikan oleh kehadiran elit baru (*new elite*) yang berasal dari mereka yang memiliki keahlian (birokrat), berlatar belakang pendidikan tinggi (aktivis) dan memiliki kekayaan (orang yang memiliki perahu, tanah, perantau, pengusaha, kontraktor). Para elite baru—aktivis, pemilik kekayaan, birokrat—bertransformasi menjadi elite politik (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD), elite ekonomi (pengusaha) dan elit politik plus ekonomi (oligarki).

Kemunculan oligarki di Wakatobi terbagi dalam dua klasifikasi: *pertama*, aktivis yang bertransformasi menjadi elit politik dan pengusaha; *kedua*, pengusaha yang bertransformasi menjadi

elit politik. Klasifikasi pertama menjadi oligarki dengan mengumpulkan kekayaan, sedangkan klasifikasi kedua menjadi oligarki dengan mempertahankan kekayaan. Para oligarki dalam mengumpulkan dan mempertahankan kekayaan dan juga kekuasaan berafiliasi dengan elite ekonomi, pengusaha, kontraktor, mantan birokrat, orang memiliki perahu dan mosega (pemberani).

Kehadiran oligarki di Wakatobi berdampak positif dan negatif dalam pembangunan kawasan perdesaan. *Pertama*, menggairakan perekonomian daerah. *Kedua*, peningkatan kunjungan wisata. *Ketiga*, membuka lapangan pekerjaan baru. *Keempat*, kemudahan akses transportasi. *Kelima*, mendorong gairah usaha baru. *Keenam*, memperlebar kesenjangan pendapatan masyarakat. *Ketujuh*, mahalnya harga tanah dan keterbatasan jumlah lahan. *Kedelapan*, kesulitan hidup nelayan. *Kesembilan*, konflik antara warga, pemerintah dan swasta. *Kesepuluh*, oligarki berusaha mempertahankan kekayaan dengan membangun dinasti.

## Referensi

### Buku

- Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan Indonesia Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- . *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Hidayat, Syarif. *Too Much Too Soon Local State Elite's perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan Kekompok Elite: Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London : Routledge, 2004.
- Robison, Richard. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Winters, Jeffrey. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia, 2011.

<sup>88</sup> Baca Kompas, "Jadi Pemain di Negeri 'Surga' Bawah Laut", 2 Agustus 2016 <http://kompasmuda.com/2016/08/02/jadi-pemain-di-negeri-surga-bawah-laut/> (diakses pada 27 Desember 2016).

## Jurnal

- Ayu, Nur, Zulkhair Burhan, Beche BT. Mamma, "Dampak Investasi Pt. Wakatobi Dive Resort Pada Sektor Pariwisata One Mobaa Serta Potensi Perkembangan Ekonomi Masyarakat Lamanggau". *Jurnal Paradigma*. Vol. 003, Nomor. 003, Juli 2015.
- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison, "Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations : The Indonesian Paradox", *Journal of Development Studies* Volume 41 Nomor 2 Bulan Februari 2005.
- Ira Irawati Dkk, "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal J@TI Undip*, Vol VII, No 1, Januari 2012.
- Suaib, Eka dan La Husen Zuada, "Fenomena Bosisme Local di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol.12, No.2. 2015.
- , "Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara". *Jurnal The Politics*. Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol. 2 No.1 Tahun 2015.

## Laporan dan Makalah

- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2015*.
- Bappenas. Laporan Akhir Evaluasi Pembangunan Perdesaan Dalam Konteks Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 2011
- Buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Wakatobi. Tim, 2008.
- Hutabarat, Melvin P. *Fenomena "Orang Kuat" Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi*, Tesis: Universitas Indonesia, 2012.
- Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilukada Tahun 2015, Bawaslu Sultra.
- Marwan, *Studi Ekonomi Politik: Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Wakatobi*. Skripsi: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014.
- Pemerintah Daerah Wakatobi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2014.
- Romli, Lili. "Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)", Jakarta: Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2007.

- Rozaki, Abrur. "Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura". *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11* (December 2009).
- Salinan Surat Perintah Bupati Wakatobi Nomor 973/334 dan lampiran
- Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015
- Simonin, Paul. Laporan Mengenai Resiliensi (Ketangguhan) Pedesaan: Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Atkinson Center for a Sustainable Future & OXFAM
- Udu, Sumiman. *Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-Tanah Sara di Wakatobi: Kajian Atas Perlawanan Masyarakat Adat*. Prosiding The 4<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: Unity, Diversity and Future, 2012.

## Wawancara

- Wawancara dengan Agus Sanaa, Wakil Sekertrais DPD PDI.P Sultra, 19 Agustus 2016.
- Wawancara dengan Muhamad Daulat, 5 Agustus 2016.
- Wawancara dengan Rasman, 31 Juli 2016
- Wawancara dengan A , Warga Tomia, Kabupaten Wakatobi, 6 Agustus 2015
- Wawancara dengan N, 7 Agustus 2016
- Wawancara dengan Munsir Salam, Komisioner Bawaslu Sultra, 28 Juni 2016
- Wawancara dengan S, 8 Agustus 2016
- Wawancara dengan Kepala Desa Lamanggau, Dete dan Kahiyanga, 5-7 Agustus 2016
- Wawancara dengan Mahmud, 22 Oktober 2016

## Sumber Internet

- Aminudin, Indrawati. "Orang Bajo di Surga Bawah Laut" <http://indoprogress.com/2012/03/orang-bajo-di-surga-bawah-laut/>
- Kompas, Penumpang Mengaku Diturunkan dari Kapal gara-gara Beda Pilihan di Pilkada. 5 Januari 2016. <http://regional.kompas.com/read/2016/01/05/15094811/Penumpang.Mengaku.Diturunkan.dari.Kapal.gara-gara.Beda.Pilihan.di.Pilkada>
- Kompas, "Jadi Pemain di Negeri 'Surga' Bawah Laut", 2 Agustus 2016 <http://kompasmuda.com/2016/08/02/jadi-pemain-di-negeri-surga-bawah-laut/>
- Kompasiana, Korupsi Bupati Waktobi. 26 April 2013. [http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-wakatobi\\_552fa49e6ea83434098b4591](http://www.kompasiana.com/putrawaka/korupsi-bupati-wakatobi_552fa49e6ea83434098b4591)
- , Nasib Tragis Buruh PT Wakatobi Dive Resort. 15 Maret 2012. [http://www.kompasiana.com/ismarindarsyah/nasib-tragis-buruh-pt-wakatobi-dive-resort\\_550e7759813311c82cbc6522](http://www.kompasiana.com/ismarindarsyah/nasib-tragis-buruh-pt-wakatobi-dive-resort_550e7759813311c82cbc6522)

- News Kabali Indonesian Culture on the World. Kebijakan Program Unggulan Hugua Kepariwisata Maritim Kurang Mendapat Respon Para Pakar Asal Kepulauan Wangi-Wangi. 5 Desember 2014. <http://kabali-indonesia.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-program-kepariwisataan.html>
- Pikiran Rakyat, Ketimpangan Penghasilan Paling Tinggi? Di Indonesia. 21 Desember 2015. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/12/21/354459/ketimpangan-penghasilan-paling-tinggi-di-indonesia>
- Suara Kendari, Profil Hugua, Putera Terbaik Sultra Calon Menteri Kelautan di Kabinet Jokowi –JK. <http://www.suarakendari.com/profil-hugua-putera-terbaik-sultra-calon-menteri-kelautan-di-kabinet-jokowi-jk.html>
- Tribun news, Pendapatan 40 Orang Kaya Setara 60 Juta Orang Miskin. 26 Oktober 2011. <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/10/26/pendapatan-40-orang-kaya-setara-60-juta-orang-miskin>

## TENTANG PENULIS

### **Ahmad Helmy Fuady**

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

### **Eka Suaib**

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: ekasuaib1966@gmail.com

### **Irhamna Irham**

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

### **Kadek Dwita Apriani**

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

### **Kurniawati Hastuti Dewi**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

### **La Husen Zuada**

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

### **Moch. Nurhasim**

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim\_nur@yahoo.com

### **Nostalgawan Wahyudi**

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan\_jauzy@yahoo.com

### **Nyimas Latifah Letty Aziz**

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

### **R. Siti Zuhro**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiewieqsz@yahoo.com.au

### **Waode Syifatu**

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

### **Yusuf Maulana**

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

